

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**HUBUNGAN ANTARAGAMA BERBASIS MULTIKULTURALISME:  
STUDI KASUS HUBUNGAN ANTARKOMUNITAS AGAMA  
DI DESA PEMENANG TIMUR KECAMATAN PEMENANG  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



**Oleh TIM PENELITI:**

**Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. (Ketua)**

**Dr. Abdul Haris, M.Ag. (Anggota)**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM**

**2013**

**HUBUNGAN ANTARAGAMA BERBASIS MULTIKULTURALISME:  
STUDI KASUS HUBUNGAN ANTARKOMUNITAS AGAMA  
DI DESA PEMENANG TIMUR KECAMATAN PEMENANG  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

\*

\*

\*

**Dr. Fawaizul Umam, M.Ag**

**Dr. Abdul Haris, M.Ag**

## PERSEMBAHAN

**Teruntuk:**

*Orang-orang yang memiliki hati  
atau yang menggunakan pendengarannya  
dan mau menyaksikan kebenaran...*

(adaptasi Qs. Qāf [50]: 37)

## SEKAPUR SIRIH

PENELITIAN ini dilihat bertolak dari kesadaran klise betapa agama sebagai salah satu anasir subjektif kebudayaan senantiasa menjadi alas utama identifikasi diri setiap individu. Melalui identifikasi itulah agama memberi alasan bagi setiap individu pemeluk untuk merasa berbeda satu sama lain—salah satu poin penting yang turut menentukan eskalasi atau bahkan kausa utama konflik bertendensi agama. Namun, pada saat yang sama, identifikasi diri itu pula yang menuntut setiap pemeluk agama untuk saling belajar hidup berdampingan, membangun koeksistensi bersama, guna menghindari benturan di tengah keniscayaan kultural yang berpuspa-ragam.

Berpegangan dengan kesadaran sedemikian, penelitian ini bermaksud hendak mengkaji bentuk dan pola hubungan antarpemeluk agama dengan menerapkan model penghampiran studi kasus sekaligus pengenaaan multikulturalisme sebagai perspektif. Adapun *locus* penelitian mengambil tempat di Pemenang Timur, sebuah desa di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di mana terdapat empat komunitas agama (Islam, Hindu, Kristen, dan Buddha) yang sejauh ini relatif mampu menampilkan suatu relasi damai dan produktif di tengah multikulturalitas kehidupan desa, khususnya dalam hal keberagaman.

Dengan prasangka multikulturalisme itulah, penelitian ini berhasrat besar untuk memahami hubungan antaragama yang dilangsungkan oleh empat komunitas agama tersebut di lokasi penelitian. Sementara, secara khusus,

bermaksud untuk menggambarkan bentuk-bentuk hubungan relasional tersebut. Penggambaran dilakukan seraya membandingkan pandangan keagamaan masing-masing komunitas tentang hubungan antaragama yang menurut mereka ideal. Kemudian, segenap penggambaran dan perbandingan itu dijadikan dasar guna menentukan model hubungan antaragama berbasis multikulturalisme seperti apa yang sebenarnya tengah mereka langungkan. Dan, *alhamdulillah*, ibarat pucuk dicinta ulam pun tiba, hasrat penelidikan itu seolah bersambut dengan “kerendahan hati” Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram untuk membiayai seluruh pelaksanaan penelitian ini melalui program Penelitian Dosen IAIN Mataram Tahun 2013. Oleh karena itu kepada institusi tersebut, terkhusus pada sang kepala, Drs. H. Sainun, M.Ag dan para stafnya, kami haturkan terima kasih mendalam.

Haturan terima kasih serupa, tentu, juga kami sampaikan kepada para pimpinan IAIN Mataram, terutama rektor (Dr. H. Nashuddin, M.Pd) dan dua dekan fakultas tempat kami berdua masing-masing bernaung, yakni Dr. H. Mutawalli el-Haqqi, M.Ag (Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram) dan Dr. H. Subhan Abdullah Acim, MA (Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram). Kepada ketiganya, ungkapan terima kasih dihaturkan terutama untuk kesediaan mereka memaklumi kami berdua menanggihkan tugas-tugas rutin selaku dosen demi kelancaran dan percepatan proses penuntasan penelitian ini.

Di luar mereka, ungkapan terima nan tulus kami persembahkan teristimewa pada para tokoh agama dan/atau masyarakat Pemenang Timur yang menjadi informan utama penelitian ini, yakni H. Lalu Mukarram (Muslim), Sukarman (Buddhis), I Nengah Sugita (Hindu), Setiyo Heri Kristanto (Kristen), Marzoan

(tokoh masyarakat, Muslim), dan Maknun (kepala desa, Muslim). Kesediaan mereka meluangkan waktu untuk kami wawancarai sungguh sangat membantu percepatan penuntasan penelitian ini di tengah tekanan *deadline*. Selebihnya, terima kasih juga disampaikan kepada para sahabat yang telah berkenan menjadi mitra diskusi yang bersemangat, terutama Asyiq, Mukhlis, Izzuddin, Ma'ruf, Suprpto, dan—tentu saja—Muzakkir dkk, pembantu peneliti yang bantuannya sungguh sangat membantu.

Di atas semuanya, terima kasih tak terhingga kami persembahkan kepada keluarga besar kami masing-masing atas seluruh doa. Dan terima kasih terindah bagi keluarga kecil kami masing-masing, istri dan anak-anak tercinta yang telah rela menjadi korban dari seluruh ambisi “intelektual” kami disertai ungkapan sesal mendalam dan permohonan maaf atas kebersamaan layaknya sebuah keluarga yang tak pernah sungguh-sungguh bisa kami hadirkan ke tengah mereka.

Akhirnya, dengan mengucap nama Allah swt sembari mengharap *syafa'at* dari kekasih-Nya, *sayyidinā* Muhammad saw, kami tawarkan laporan hasil penelitian ini ke ruang publik. Besar harapan kami, hasil penelitian ini memberi manfaat maksimal, tidak hanya dalam mempergaduh keriuhan studi-studi keagamaan kontemporer tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk terus memelihara komitmen perdamaian dan kesediaan hidup ko-eksisten di tengah multikulturalitas keyakinan dan agama. *Salāmullāhi 'alaykum!*

Kuala Lumpur, 13 Desember 2013

**Fawaizul Umam & Abdul Haris**

## DAFTAR ISI

Halam Judul  
Persembahan  
Sekapur Sirih  
Daftar Isi

### **Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Fokus Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kajian Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Bahasan

### **Bab II Multikulturalisme sebagai Perspektif**

- A. Melampaui Pluralisme
- B. Lima Tipologi
- C. Kerangka Pandang

### **Bab III Spirit Multikulturalisme dalam Hubungan Antarkomunitas Agama:**

#### **Pemaknaan dan Tipologi**

- A. Profil Desa Pemenang Timur
- B. Demografi Keagamaan
- C. Bentuk-bentuk Hubungan
- D. Memindai Spirit
- E. Ancaman Aktual dan Potensial
- F. Menakar Peran Negara
- G. Model Multikulturalisme Baru?

### **Bab V Penutup**

- A. Simpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Biodata Tim Peneliti

Lampiran-lampiran



# BAB I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang

Hubungan antaragama (baca: antarumat beragama), sebagaimana setiap hubungan, tak pernah berwajah tunggal. Dinamikanya selalu mengenal pasang-surut. Selain menampilkan wajah protagonistik, ia kerap pula memunculkan sisi antagonistik, aktual maupun potensial. Fakta-fakta relasi harmonis antarumat beragama berlangsung beriringan dengan konflik-konflik sosial antarumat di mana agama, langsung maupun tidak, menjadi salah satu alasan kausalnya.

Agama sendiri, hingga tingkat tertentu, sebagai suatu sistem keyakinan memang menyimpan potensi mencipta dan memperbesar konflik sosial antarumat. Boleh jadi bukan lantaran ajaran formal agamanya, tapi yang pasti potensi *latent* itu berkait rekat dengan model internalisasi dan eksternalisasi keagamaan umat terhadap berbagai simbolisasi sistem keyakinan agama mereka sendiri. Tak berlebihan bila pada gilirannya agama sebagai suatu kategori sosial *in fact* lebih sering menjadi soal. Dengan sendirinya itu menampakkan sisi “gelap” dari apa yang disebut agama dan keberagamaan.

Tesis sedemikian bukan tidak beralasan: betapa sepanjang sejarah manusia, agama kerap kali terlibat, secara langsung maupun tidak, dalam berbagai konflik di seantero belahan dunia tak terkecuali di Indonesia, termasuk di Pulau Lombok.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995), 121-2. Untuk kasus Indonesia, tercatat deretan tragedi berdarah-darah serta aneka rusuh dengan tendensi agama, seperti Ambon, Ternate, Tidore, Poso, Sampit, Sambas, Kupang, Aceh, dan NTB. Untuk konteks Lombok atau NTB lihat pemetaan

Kesemua fakta itu seolah membenarkan perspektif lazim yang melihat agama sebagai entitas kebudayaan yang tak hanya berfungsi integratif tapi juga kerap disintegratif.<sup>2</sup> Budaya, antara lain melalui agama, akan memilah-mengategorikan manusia ke kutub budayanya masing-masing dan karena itu menjadi faktor penyebab konflik yang utama. Di situ, garis-garis pemisah antarbudaya (*cultural fault lines*) akan menjadi garis-garis pertentangan-pertikaian yang amat signifikan;<sup>3</sup> agama menjadi salah satu entitas budaya yang paling potensial memantik pertentangan.

Di titik itulah dibutuhkan suatu kesadaran multikultural untuk hidup berdampingan di tengah keberbedaan. Kesadaran dimaksud menuntun masyarakat ke dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, betapapun mereka mengalami kompleksitas perbedaan latar budaya, sejarah, bahasa, tradisi, suku, ras, bangsa, golongan, dan agama.<sup>4</sup> Dengan kesadaran sedemikian, suatu masyarakat yang multikultural dipahami sebagai tidak homogen, melainkan berkarakteristik heterogen di mana berbagai pola relasi sosial antaranggota masyarakat berlangsung penuh toleransi dalam ketersediaan hidup berdampingan secara damai (*peace co-existence*) seraya saling menenggang bentuk-bentuk

---

Asnawi, "Konflik dan Karakteristiknya," Makalah (tidak diterbitkan), Mediation Centre IAIN Mataram (2004): 1-8.

<sup>2</sup>Bdk. dengan ramalan futurolog masyhur, Naisbitt, yang menyebut fenomena dimaksud sebagai salah satu gejala paradoks perkembangan tata dunia baru. Lihat selengkapnya, John Naisbitt, *Global Paradox*, terj. Budijanto (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994).

<sup>3</sup>Bdk. dengan tesis (baca: ramalan) Huntington di paruh awal 1990-an yang menengarai bahwa ke depan faktor penentu utama percaturan politik dunia adalah perbedaan budaya dan peradaban. Ia menunjuk salah satu unsur perbedaan paling determinan adalah agama. Ia pun bersimpulan bahwa benturan peradaban yang bakal berlangsung menonjol adalah antara Barat-Kristen dan "hubungan Islam-Confusius". Karena itu, sambungnya, tidak ada lagi "peradaban universal," yang ada ialah peradaban-peradaban dunia yang berbeda-ragam yang menuntut mereka untuk saling belajar hidup berdampingan. Lihat Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilization?" dalam *Foreign Affairs* (Summer, 1993): 22-49.

<sup>4</sup>Lihat Jawahir Thontowi, "Multikulturalisme dan Agenda Pembaharuan Sosial," dalam *Jurnal Media Inovasi*, No. 1 Th. XI (2001): 16-7.

disparitas yang melekat di diri masing-masing, tak terkecuali disparitas agama dan orientasi keberagamaan. Tatkala kerukunan, kedamaian, dan kohesivitas sosial di suatu masyarakat multikultural tercipta, maka kesadaran tersebut menuai fungsi fundamentalnya sebagai pemerkuat integrasi sosial di mana keberbagaian dan keberbedaan sungguh-sungguh diakui, dihargai, dan dihormati.

Kesadaran multikultural dan kehidupan ko-eksisten itulah yang hendak ditelusuri di lokasi penelitian, yakni desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasar amatan pendahuluan, masyarakat Pemenang Timur menampilkan fakta sosial-budaya yang begitu heterogen yang untuk ukuran desa tentu menakjubkan. Dari sisi kepegunungan agama, misalnya, terdapat empat agama “resmi” yang dipeluk masyarakat, yakni Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen; belum soal orientasi keberagamaan yang secara ideologis berpunggungan (Muhammadiyah, NW [Nahdlatul Wathan], juga Jama’ah Tabligh). Di luar keempatnya, terdapat pula keberagamaan lokal yang masih takdzim dihayati sebagian kecil masyarakat, yaitu Boda dan Wetu Telu.

Realitas heterogen itu agaknya tak membuat mereka kehilangan alasan untuk hidup damai berdampingan. Mereka, misalnya, saling berbagi otoritas publik (pemerintahan desa) juga otoritas adat berdasarkan prinsip “proporsionalitas” dan *representativeness* antarkomunitas agama—sehingga problem relasi mayoritas (komunitas Muslim) dengan minoritas (komunitas agama lain) relatif tertengahi. Bahkan, di tingkat penghayatan atas simbol-simbol kultural-keagamaan mereka cenderung baur meski tetap sembari mempertahankan karakteristik masing-masing. Saat momen Idul Fitri, misalnya, umat agama lain

ikut pula merayakan dengan antara lain menyediakan penganan, saling bermaaf-maafan, dan beranjngsana. Demikian pula sebaliknya ketika Natal (Kristen), atau kala perayaan Pujawali atau Galungan dan Kuningan (Hindu). Seluruh komunitas menyatu, misalnya, tatkala diadakan upacara-upacara ritual adat seperti *presean* (ritual minta hujan), dan sejenisnya.

Realitas sosial sedemikian mengindikasikan ada hal-hal menarik terkait modal sosial (*social capital*) yang masyarakat Pemenang Timur pelihara bersama yang di studi ini kuat ditengara berhulu pada kesadaran akan spirit multikulturalisme. Paling tidak, ko-eksistensi sosial di desa tersebut jelas merupakan fakta “anomali” di tengah beraneka fakta relasi antaragama yang sering antagonistik di berbagai tempat dan karena itu tentu menarik untuk dikaji dengan tilik pandang multikulturalisme. Menarik, terlebih jika pengkajian itu dilakukan dengan alur “bergerak dari bawah”, dari realitas menuju ke konseptualiasi suatu model multikulturalisme; bukan sebaliknya, “bergerak dari atas”, dari pemilihan model multikulturalisme tertentu untuk kemudian dicocok-cocokkan dengan realitas.

Oleh karena itu, studi ini bermaksud memulai pengkajian dengan mengangkat realitas empirik masyarakat di lokasi penelitian untuk kemudian dipetakan pola penghayatan keberagaman beserta model-model relasi mereka dan kemudian dibangun suatu model multikulturalisme di ujung studi. Pendekatan kajian “dari bawah ke atas” ini adalah ciri penting dari penghampirang kualitatif yang bergerak dengan logika induktif-abstraktif. Inilah yang sekaligus membedakan studi ini secara diametral dengan beragam perbincangan

multikulturalisme dan realitas multikultural yang umumnya dimulai dari konsep yang dibawa dari luar guna menjelaskan realitas yang dijumpai di lapangan.

Dengan cara begitu, pencarian model multikulturalisme dalam pola-pola hubungan antaragama pada masyarakat lokal, sebagaimana diancang studi ini, dimaksudkan untuk menghindari isolasi konsepsi lokal dan nasional karena isu multikulturalisme dan relasi antaragama sejatinya juga isu global. Ini penting artinya bagi pengayaan konseptual diskursus multikulturalisme sendiri di satu sisi dan pemberian basis revitalisasi berbagai ikhtiar mencipta kehidupan ko-eksisten antarumat beragama *plus* integrasi sosial bangsa pada umumnya di sisi lain. Dalam kerangka itulah, studi ini meletakkan segenap relevansi ilmiah dan signifikansi sosialnya.

## **B. Fokus Masalah**

Konstelasi hubungan antaragama di suatu masyarakat selalu berkait dengan basis normatif agama-agama bersangkutan dan persepsi para pemeluk tentangnya juga kebijakan-kebijakan publik terkait dan seluruh latar sosial-politik-budaya yang mengitarinya. Namun, penelitian ini membatasi fokus kajian pada persepsi dan apa yang diejawantahkan para pemeluk dalam kerangka hubungan antaragama.

Dalam konteks itu, penelitian ini menempatkan agama dan keberagaman terutama sebagai suatu entitas budaya, suatu anasir objektif sekaligus subjektif dari kebudayaan. Jadi, lingkup masalahnya berpusat pada bagaimana spirit lintas-ragam budaya, dalam hal ini multikulturalisme, beroperasi sekaligus menjadi basis dari setiap pola hubungan antaragama yang berlangsung di lokasi studi,

Pemenang Timur. Inilah yang hendak dipahami dan digambarkan dalam penelitian ini.

Upaya penggambaran dilakukan seraya membandingkan persepsi keagamaan masing-masing komunitas tentang hubungan antaragama yang telah mereka jalankan maupun idealkan, dicari persamaan dan perbedaannya. Segenap penggambaran dan perbandingan itu lalu dijadikan dasar guna menentukan model hubungan antaragama berbasis multikulturalisme seperti apa yang tengah mereka laksanakan.

Selanjutnya, berdasar batasan dan penentuan lingkup masalah tersebut dan demi menghindari pelebaran fokus, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hubungan antaragama yang selama ini dilaksanakan empat komunitas agama (Islam, Hindu, Kristen, Buddha) di Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara?
2. Bagaimana persepsi keagamaan masing-masing komunitas agama dalam memaknai hubungan antaragama itu?
3. Bagaimana model tipologis hubungan antaragama dan pemaknaan masing-masing komunitas atasnya dalam perspektif multikulturalisme?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Secara umum, dengan prasangka multikulturalisme, penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antaragama yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh empat komunitas agama *plus* dua agama lokal di Pemenang Timur. Sementara, secara khusus, bermaksud menggambarkan bentuk-bentuk hubungan

relasional itu, termasuk pemaknaan komunitas agama atasnya, sekaligus menelusuri tendensi multikulturalisme di dalamnya.

Dengan tujuan sedemikian, hasil dari studi ini diproyeksikan dapat memberi beberapa kegunaan ilmiah. *Pertama*, khusus untuk konteks Islam, ia dapat digunakan sebagai informasi awal yang bermanfaat *plus* representatif untuk membuat peta *da'wah islâmiyah* yang secara paradigmatis lebih empatik terhadap pluralitas dan multikulturalitas, tak hanya di Pemenang Timur atau Lombok Utara tapi lebih jauh di NTB. Penelahan hubungan antaragama akan membantu pemosisian Islam di tengah dinamika sosial-keagamaan masyarakat di provinsi ini pada umumnya, lebih-lebih mengingat geo-politik NTB yang berada di tengah apitan Bali “yang Hindu” dan Nusa Tenggara (NTT) “yang Nasrani”. Pemetaan lebih lanjut peluang dan/atau problem kultur-keagamaan baik yang laten maupun manifes jelas akan berguna dalam mengerangkai *redesigning* hubungan antaragama (termasuk agama lokal) berbasis multikulturalisme yang damai, toleran, dan harmonis. Konteks kegunaan yang terakhir ini terutama bagi penelitian-penelitian berikutnya yang bertopik senada.

Kemudian, *kedua*, hasil kajian ini berguna sebagai titik anjak pengayaan teoretis dan penjajagan kemungkinan membangun saling-pengertian antarumat beragama yang berbasiskan spirit multikulturalisme. Dalam pada itu, tesis-tesis yang muncul dapat menjadi kerangka dasar untuk membangun kesepahaman akan urgensi dialog antaragama dan penumbuhan sikap saling menghargai antarpenganut sehingga apa yang di sini disebut “hubungan antaragama berbasis multikulturalisme” sungguh-sungguh memberi arti produktif bagi lahirnya sensitivitas beragama nan santun pada diri umat beragama. Apalagi menyoal

wacana multikulturalisme dalam konteks Indonesia sangatlah menarik karena konsep ini lahir dari sejarah sosial yang amat berbeda dengan Indonesia. Maka, tentu, dibutuhkan proses kontekstualisasi atasnya. Sebab, tanpa itu, ia hanya akan mengalami alienasi dan kehilangan relevansi mengingat tidak semua ajuan konsepnya serta-merta kompatibel dengan situasi sosial negeri ini.

Selain itu, *ketiga*, hasil penelitian ini dapat pula bermanfaat sebagai bahan pertimbangan informatif bagi semua pihak yang mengambil *concern* pada agenda-agenda dialog antaragama, pluralisme agama, demokratisasi kehidupan beragama, dan kebebasan beragama, teristimewa di provinsi NTB. Seterusnya, dapat pula menjadi bahan timbangan dasar bagi para penentu kebijakan (elit legislatif maupun eksekutif) di NTB, terutama di Lombok Utara, dalam merumuskan berbagai kebijakan publik berbasis multikulturalisme di bidang sosial-politik-budaya-keagamaan, terkhusus menyangkut hubungan antarumat beragama. Dalam konteks itu, minimal dapat memberi makna tentang betapa pentingnya mengarifi hubungan antaragama melalui pelibatan secara serius para pemuka agama (dan adat) dalam penguatan kebijakan publik dimaksud dan penciptaan dialog intensif-komunikatif-interaktif guna membangun suatu pola kerukunan antarumat beragama berbasis multikulturalisme yang *visible* dan *applicable*.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dibanding isu pluralisme yang aneka teoretisasinya telah berkembang mapan, wacana multikulturalisme bisa dibilang baru. Bila merujuk rentang terbit beberapa karya terkait, wacana multikulturalisme agaknya mulai mengemuka sebagai suatu “disiplin” kira-kira sejak era 1990-an. Sejumlah karya-karya



“pendahuluan” terkait memang telah terbit sejak akhir 1970-an seiring munculnya sejumlah kebijakan publik berbasis multikulturalisme di Kanada, Inggris, dan Australia,<sup>5</sup> tetapi karya-karya terpenting seputar multikulturalisme mulai bermunculan di rentang tahun 1990-an itu.

Belakangan *discourse* multikulturalisme semakin menguat seiring maraknya studi-studi kebudayaan (*cultural studies*), bahkan dalam kajian-kajian poskolonial (*postcolonial studies*), ia kerap menjadi *entry* penting dalam menelusuri dinamika kultural (juga politik) dari apa yang disebut kelompok-kelompok *subaltern*<sup>6</sup>—yang belakangan kajian-kajian khusus atas kelompok-kelompok dimaksud telah memunculkan satu nomenklatur baru dalam *postcolonial studies*, yakni *subaltern studies*.<sup>7</sup>

Di Indonesia, multikulturalisme semakin menjadi wacana publik, bahkan seolah mengganti wacana pluralisme yang marak diperbincangkan lebih dulu. Para penganjurnya memandang ide multikulturalisme penting untuk terus didesakkan ke kesadaran publik mengingat Indonesia adalah negeri yang sangat

---

<sup>5</sup> Hal itu seiring derasnya upaya-upaya mencapai kesederajatan dalam perbedaan antarcorak kebudayaan orang kulit putih, orang Indian, dan kulit hitam, serta sukubangsa-sukubangsa minoritas lain di Amerika pada tahun 1970-an. Saat itu, upaya-upaya peneguhan antirasisme dan penolakan diskriminasi sosial-kultural dijalankan dengan menyebarkan ide-ide multikulturalisme melalui pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Uraian menarik tentang ini lihat selengkapnya Sonia Nieto, *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education* (New York: Longman, 1992).

<sup>6</sup> Simak *trend* tersebut, misalnya, dalam karya-karya Gayatri Spivak yang disunting oleh Donna Landry dan Gerald Maclean, *The Spivak Reader: Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak* (New York: Routledge, 1996).

<sup>7</sup> Lihat, misalnya, Vinayak Chaturvedi (ed.), *Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial* (London: Verso, 2000). Sejumlah tulisan di buku ini berupaya mengungkap bagaimana marginalitas menjadi kunci untuk memahami masalah-masalah nasionalisme, kolonialisme, dan modernitas. Juga diungkap pengaruh kelompok-kelompok pengayuh *subaltern studies* di India, terkhusus dalam *cultural studies* dan *postcolonial studies*, dalam mengkritik *trend* elitisme kaum kolonial dan nasionalis-borjuis yang menampak dalam berbagai penulisan sejarah kolonialisme dan nasionalitas.

multikultur. Hanya saja, sebagaimana diungkap Thufail,<sup>8</sup> perkembangan wacana multikulturalisme di Indonesia lebih disebabkan oleh kecanggungan teori-teori kebudayaan menyikapi munculnya ruang-ruang publik dengan berbagai macam artikulasi kepentingan etnis, religius, dan sejarah. Itulah mengapa perbincangan multikulturalisme di Indonesia tak dapat dilepaskan dari persoalan seputar makin beragamnya ruang-ruang publik. Artinya, multikulturalisme harus dilihat sebagai sebuah proses yang berlangsung di ruang publik, bukan sekedar sebuah kondisi yang menentukan suatu, dan satu-satunya, ruang publik. Sebagai sebuah proses, multikulturalisme tentu bersandar pada negosiasi antarberbagai praktik sosial (*social practices*); sebuah proses politik kebudayaan yang tak selalu menghasilkan sebuah ruang publik homogen dan setara seperti dibayangkan Will Kymlicka.

Kymlicka sendiri, dalam bukunya, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Right* (New York: Oxford University Press Inc., 1995),<sup>9</sup> memang mengandaikan suatu ruang publik di mana semua komunitas berikut kepentingan kulturalnya masing-masing saling berinteraksi dan bernegosiasi secara setara. Terlepas realistis atau tidak, pengandaian itu penting mengingat struktur multikultural masyarakat modern telah memunculkan berbagai konflik dan isu-isu baru, seperti tuntutan akan pengakuan dan dukungan atas identitas kultural kelompok-kelompok minoritas etnis. Dalam hal ini, Kymlicka menekankan bahwa tak ada formula tunggal yang dapat diterapkan pada semua kelompok, terlebih kepentingan dan aspirasi antara masyarakat pribumi dan

---

<sup>8</sup> Lihat Fadjar I. Thufail, "Riot Narrative: Public Sphere, Pragmatism, and (Multi) Cultural Politics," dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, XXVIII, No. 75 (September-Desember, 2004), dalam <http://www.jai.or.id/jurnal/2004/75/09fit75.htm> (29 Juni 2013).

<sup>9</sup> Telah diterjemahkan Edlina Hafmini Eddin dengan judul *Kewargaan Multikultural* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003).

minoritas nasional dan juga para imigran sangatlah berbeda. Disebutkan bahwa hak-hak kolektif tertentu untuk kultur-kultur minoritas memiliki konsistensi dengan prinsip-prinsip demokratik liberal dan bahwa keberatan-keberatan liberalisme untuk mengakui hak-hak semacam itu berdasarkan kebebasan individu, keadilan sosial, dan persatuan nasional dapat diatasi. Dalam konteks itu, Kymlicka mengetengahkan berbagai konsepsi tentang hak-hak dan status kultur-kultur minoritas di samping juga membahas isu-isu seperti hak-hak berbahasa, perwakilan kelompok, klaim lahan, federalisme dan separatisme kultural yang merupakan isu-isu sentral untuk memahami politik multikultural—tapi, anehnya, diabaikan dalam teori-teori liberal kontemporer.<sup>10</sup>

Terkait penyediaan ruang publik bagi saling-silang antaridentitas kultur, liberalisme memang disangsikan bisa menyediakannya. Secara implisit itu ditegaskan, misalnya, antara lain oleh Charles Taylor dalam bukunya, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994).<sup>11</sup> Ia mengulas, antara lain, sejauh mana institusi-institusi pemerintahan liberal demokratis menyediakan ruang bagi pengakuan akan nilai dari suatu tradisi budaya yang berdiri sendiri. Menurutnya, pemerintahan liberal seyogyanya menyediakan ruang dimaksud, suatu *politics of recognition*. Soal pengakuan politik atas identitas-identitas kultur ini memang menjadi tema utama

---

<sup>10</sup>Terkait kritik multikulturalisme atas liberalisme ini, bandingkan identifikasi Kymlicka dengan, misalnya, Jim Parry, "Sport, Universals, and Multiculturalism," dalam Adam Muller (ed.), *Concepts of Culture: Art, Politics, and Society* (Alber, Canada: University of Calgary Press, 2005): 265-90.

<sup>11</sup>Buku ini diperkaya dengan komentar kritis dari sejumlah intelektual, yaitu K. Anthony Appiah, Jürgen Habermas, Steven C. Rockefeller, Michael Walzer, Susan Wolf, dan Amy Gutmann yang mengedit sekaligus memberi kata pengantar.

perdebatan dalam buku ini, tepatnya perdebatan antara para filosof dan ilmuwan sosial tentang berbagai kontroversi politik menyangkut multikulturalisme.

Sejauh menilik beberapa karya, multikulturalisme agaknya tak hanya diketengahkan sebagai suatu gugus kesadaran akan toleransi, kesetaraan, dan sejenisnya, tetapi juga suatu bangunan ideologis dan gerakan.<sup>12</sup> Sebagai suatu kesadaran, multikulturalisme berbeda dan karenanya harus dibedakan dengan pluralisme (lebih lanjut lihat sub Landasan Teori penelitian ini). Pentingnya pembedaan itu dalam perdebatan teoretik multikulturalisme diungkap secara kritis oleh sejumlah tulisan dalam David Theo Goldberg (ed.), *Multiculturalism: A Critical Reader* (Oxford: Blackwell, 1994). Secara keseluruhan buku ini merupakan pengantar memadai untuk memahami multikulturalisme dan perbedaannya dengan pluralisme. Perdebatan yang mengemuka di buku ini menyangkut saling-silang pengertian multikulturalisme, *trend* paradigmatis yang dikembangkan sejumlah aliran dalam multikulturalisme hingga upaya untuk merambah suatu bentuk gerakan baru bernama multikulturalisme kritis.

Sementara sebagai suatu gerakan, multikulturalisme berkait erat dengan tuntutan normatifnya sendiri akan perlunya perubahan dalam cara kita memandang “yang lain” (*the other; liyan*) dengan tujuan bersama-sama merayakan perbedaan dan bukan saling menegasikan. Penekanannya pada bagaimana menciptakan kesetaraan dan kesederajatan antaridentitas kultur di ruang publik.<sup>13</sup> Gerakan multikulturalisme merupakan proyek multidimensional

---

<sup>12</sup>Bdk. tengara ini dengan paparan Caleb Rosado, “Toward a Definition of Multiculturalism,” dalam [http://www.rosado.net/pdf/Def\\_of\\_Multiculturalism.pdf](http://www.rosado.net/pdf/Def_of_Multiculturalism.pdf) (28 April 2008).

<sup>13</sup>Chris Barker, *Cultural Studies: Teori & Praktik*, terj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 379-81.

yang melibatkan berbagai etnis atau kelompok-kelompok minoritas dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam komunitas.<sup>14</sup>

Dalam pada itu, gerakan multikulturalisme mendesak gugatan, perlawanan, terhadap anasir liberalisme seperti bentuk negara-bangsa (*nation-state*), nasionalisme, dan gerakan feminis arus utama (liberal). Mereka juga menggugat konstruksi ideologi-ideologi dominan yang mengusung agenda penyeragaman, suatu homogenisasi keberagaman, seperti ideologi *melting pot*, *tributaries*, *tapestry*, dan *garden salad* atau *salad bowl*.<sup>15</sup> Ideologi *melting pot* (panci pelebur), misalnya, di AS dikritik habis karena mendesak seluruh pendatang (imigran) yang berasal dari berbagai asal-usul budaya agar berasimilasi dan meleburkan diri ke dalam kultur dominan, yaitu menjadi orang “Amerika asli” yang berlatar budaya White Anglo-Saxon Protestants (WASP). Segenap aspek kebudayaan yang melekat pada kaum imigran harus ditanggalkan demi beralih menjadi orang Amerika baru. Kebudayaan imigran atau penduduk kulit berwarna seperti masyarakat Indian dan kulit hitam harus diasimilasi, dileburkan (*melted*).<sup>16</sup>

Hingga tingkat tertentu, multikulturalisme—sebagai kesadaran, ideologi, dan gerakan—memang cenderung menampilkan diri sebagai bentuk perlawanan terhadap ideologi liberalisme. Sejumlah karya terkait juga menegaskan kecenderungan itu. Yang terpenting di antaranya adalah kritik Bikhu Parekh atas

---

<sup>14</sup>Misalnya, kelompok-kelompok *Native Americans*, *African Americans*, dan *Latino-Americans*; atau kalau di Indonesia, misal Kajang Indonesia, Papua Indonesia, Bugis Indonesia, Mbojo Indonesia, Madura Indonesia, Sasak Indonesia, Jawa Indonesia, dan seterusnya. Lihat Ahmad Baso, *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam* (Depok: Desantara, 2002), 97-8.

<sup>15</sup> Lihat Alo Liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2003), 16-8.

<sup>16</sup>Baso, *Plesetan...*, 98.

ideologi liberalisme sebagaimana ia ungkap dalam bukunya, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theori* (Hampshire: Macmillan, 2000). Fokus utama buku ini menelisik bagaimana multikulturalisme melancarkan gugatan terhadap hegemoni ideologi liberalisme. Menurut Parekh, isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi yang dipanggul kaum liberal tidak lagi memiliki relevansi dalam kondisi multikultural. Untuk itu, sambungnya, isu-isu HAM dan soal demokrasi harus dibaca secara baru dengan perspektif multikulturalisme agar pengetengahan isu-isu utama liberalisme tersebut sejalan dan selalu relevan dengan isu-isu multikultural, seperti diskriminasi atau ketimpangan sosial menyangkut perbedaan warna kulit, etnisitas, dan kaum imigran.

Dalam kerangka kritik itu pula, kebanyakan karya terkait menyepakati bahwa salah satu strategi penting persebaran sekaligus penguatan wacana multikulturalisme adalah melalui pendidikan dan pengajaran, terkhusus di sekolah-sekolah. Itulah mengapa perdebatan multikulturalisme hampir selalu menyoal dalam konteks pendidikan. Tak aneh bila buku-buku tentang pendidikan multikultural marak bermunculan, termasuk di Indonesia. Satu buku yang layak disebut adalah Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society* (New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002). Buku ini mengetengahkan sejumlah deskripsi seputar tujuh *microculture* yang lazim dimiliki para murid dan guru, yaitu kelas, etnisitas dan ras, gender, *exceptionality*, agama, bahasa, dan usia. Ketujuh *microculture* tersebut ditempatkan sebagai basis utama untuk memahami masyarakat yang pluralistik dan pentingnya pendidikan multikultural. Melalui penempatan ketujuh *microculture* itu, keduanya mencoba

mengintegrasikan antara paedagogi kritis dan riset dalam kerangka penyelenggaraan pengajaran yang efektif.

Lalu, bagaimana perkembangan studi multikulturalisme di Indonesia? Sejauh ini, bisa dibilang, tidak banyak studi yang muncul dengan pembahasan komprehensif mengenai multikulturalisme untuk konteks Indonesia.<sup>17</sup> Sebagian besar masih berupa pengayaan teoretik belaka—termasuk karya-karya terjemahan semisal karya Kymlicka tadi. Satu karya “pribumi” yang dapat dipertimbangkan untuk pemer kaya teoretisasi tentang multikulturalisme adalah karya Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005). Di buku ini, Liliweri berupaya memetakan bagaimana sebaiknya kebijakan multikultural diterapkan di negeri semajemuk Indonesia. Menurutnya, kebijakan multikultural mula-mula harus mempertimbangkan keragaman identitas masyarakat Indonesia, terutama identitas ras dan etnik. Sebab, dari konflik-konflik yang terjadi selama ini, identitas ras dan etnik menjadi faktor dominan penentu eskalasi konflik atau bahkan pemantik utama. Baginya, langkah pencegahan antara lain dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural, sekurang-kurangnya melalui pendidikan komunikasi lintas budaya.

Di luar buku-buku yang berkuat di teoretisasi, salah satu buku terpenting yang bisa disebut adalah terbitan The Interseksi Foundation berjudul *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia* (Jakarta, 2005) yang disunting Hikmat Budiman. Terpenting karena, kecuali dua tulisan (Nurkhoiron dan Patra

---

<sup>17</sup>Sebagaimana juga diakui Hikmat Budiman dalam pengantarnya, “Editorial Yayasan Interseksi: Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas,” atas sejumlah hasil penelitian yang dihimpun dan diterbitkan dengan judul *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesi* (Jakarta: The Interseksi Foundation-Yayasan TIFA, 2005): 1-29.

M. Zein), buku tersebut merupakan kumpulan hasil penelitian tentang komunitas-komunitas lokal di Indonesia seperti komunitas Wana di Kayupoli Sulawesi Tengah (Ignatius Sudaryanto), Sedulur Sikep di Bombong-Bacem Pati Jawa Tengah (Uzair Fauzan), Wetu Telu Wet Semokan di Bayan Lombok Barat (Heru Prasetya), Dayak Pitap di Balangan Kalimantan Selatan (Riza Bahtiar), dan Kajang di Bulukumba Sulawesi Selatan (Syamsurijal Adhan). Hanya saja, seperti halnya karya Liliweri, penelitian-penelitian itu cenderung mengabaikan agama dan keberagaman sebagai salah satu unit analisis dalam kajian multikulturalisme—kecuali bagan teoretik Nurkhoiron. Arah pengkajian lebih kepada persoalan adat dan etnisitas yang dihubungkan dengan dinamika mayoritas dan minoritas seperti politik representasi, perebutan otoritas, dan *politics of recognition*.

Di luar itu kebanyakan tulisan-tulisan lepas, berupa tulisan yang tersebar di jurnal-jurnal ilmiah dan koran-koran. Apa yang kemudian diterbitkan sebagai buku sejatinya lebih merupakan kumpulan tulisan-tulisan lepas baik berupa makalah ilmiah maupun ilmiah populer. Sebut misal, karya Abdul Munir Mul Khan (*Kesalehan Multikultural: Ber-Islam Secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global* [Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005]) dan M. Amin Abdullah (*Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius* [Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005]).

Seluruh pustaka tentang multikulturalisme, terkhusus yang ditelaah di sini, betapapun beda fokus, sudut tilikan, pendekatan, atau strategi implementasinya, secara umum tetap bermuara pada ide dasar dari multikulturalisme sendiri, yakni kesedarajatan atau kesetaraan antaridentitas kultur. Ide dimaksud menekankan



bahwa kesederajatan itu hanya mungkin mengejawantah di ruang-ruang publik melalui pengakuan setara terhadap semua identitas kultur; tak ada pengabaian terhadap hak-hak dan eksistensi kelompok-kelompok budaya sekalipun minoritas. Sehubungan itu, pustaka-pustaka terkait umumnya mengetengahkan isu-isu utama multikulturalisme semisal problem mayoritas-minoritas, hak-hak minoritas, kaum imigran, ras dan etnisitas, gender, kelas, wilayah geografis, disparitas bahasa, dan termasuk juga agama dan keberagamaan.

Hanya saja isu yang terakhir itu, anasir agama dan keberagamaan, tak terlalu menyita perhatian para pemerhati untuk sungguh menghiraukannya sebagai problem dasar multikulturalisme dan relasi antarumat beragama sebagai faktor pembentuk dinamika multikultural ketimbang, misalnya, perhatian mereka pada problem-problem kaum imigran atau relasi mayoritas-minoritas. Padahal, agama sejatinya juga sebuah entitas budaya. Ini terkait dengan posisinya sebagai salah satu anasir objektif kebudayaan di samping bahasa, tradisi, sejarah, institusi-institusi, adat-istiadat, dan etnis.<sup>18</sup>

Sementara untuk konteks Lombok, terlebih Lombok Utara, penelitian seputar hubungan antaragama tak cukup banyak dilakukan, masih sedikit. Dari yang sedikit itu umumnya menyisir hubungan antaragama dan pola-pola penyiaran agama terkait potensi konflik yang mengiringnya. Semua penelitian dimaksud umumnya menggunakan pluralisme sebagai perspektif pembacaan. Lokasi studinya pun umumnya berpusat di Kota Mataram, ibukota Provinsi NTB, bukan di kabupaten Lombok Utara, apalagi di lokasi studi terpilih (Pemenang

---

<sup>18</sup>Lihat kembali Huntington, “The Clash...,” 22-49.

Timar) yang dalam amatan sementara tengah menampilkan model masyarakat multikultural dari sisi agama dan keberagamaan.

Untuk penelusuran pola-pola hubungan keagamaan, tepatnya hubungan Hindu-Muslim di Kota Mataram, dan seberapa besar potensi konflik yang bisa ditimbulkannya dihelat Mustain lewat penelitian berjudul *Hubungan Hindu-Muslim di Kota Mataram (Kajian terhadap Potensi Konflik dan Integrasi Hubungan Antaragama)* (Mataram: P3M STAIN Mataram, 2003). Fokus studinya mengarah pada konflik-konflik potensial sekaligus kemungkinan-kemungkinan integratif yang muncul dalam relasi keagamaan umat Hindu dengan umat Islam di kota Mataram. Selebihnya ia abai pada akar kausal dari kenyataan-kenyataan destruktif atau konstruktif yang potensial mewarnai relasi keagamaan kedua umat, misalnya terkait pola-pola strategis penyiaran yang dikembangkan keduanya.

Penelusuran atas akar kausal itu lalu diretas Fawaizul Umam di tahun 2004 (Lemlit IAIN Mataram) lewat sebuah penelitian berjudul “Antara Membina dan Memperbanyak Umat: Pola Penyiaran Agama Hindu dan Islam di Kota Mataram”. Fokus studinya diarahkan pada penyisiran tendensi pluralisme dan/atau antipluralisme dalam paradigma penyiaran yang dikembangkan kedua agama. Temuan utamanya tak terlalu mengagetkan. Tendensi antipluralisme ternyata cenderung lebih menampak pada aktivitas penyiaran yang dijalankan para pelaku dakwah Islam (*dâ’î*). Hal itu, secara paradigmatis, menegaskan kuat pada *ghirah* “memperbanyak” umat di kesadaran teologis para *dâ’î*; suatu hal yang, hingga tingkat tertentu, berkebalikan dengan kesadaran para *dharma duta* Hindu yang justru berorientasi “membina” umat, suatu upaya penguatan ke dalam.

Sementara studi tentang pola-pola penyiaran agama di internal Muslim sendiri cukup banyak; mulai dari yang mencoba menghampirinya dengan prasangka pluralisme hingga ke studi yang menyoalnya dengan cara menelisik aktivitas dakwah yang dijalankan aneka lembaga atau organisasi dakwah-keagamaan. Khusus untuk studi model pertama, antara lain, direpresentasikan Suprpto yang mencoba mengkaji pola-pola dakwah para *dâ'î* dengan perspektif pluralisme agama.<sup>19</sup> Dalam hal ini ia menerapkan analisis isi (*content analysis*) atas materi khutbah Jumat pada sejumlah masjid di Kota Mataram dengan tujuan menakar sejauh mana para *khâtib* memberi apresiasi terhadap wacana pluralisme agama sekaligus menyisir adakah tendensi antipluralisme dalam materi khutbah mereka.

Dalam pada itu, fokus curiositas intelektual pada tema-tema pluralisme juga menghinggapi satu dua penelitian yang mengambil area studi se-pulau Lombok atau bahkan Provinsi NTB. Tunjuk misal, penelitian Israil, dkk. berjudul “Dinamika Pluralisme Agama di Nusa Tenggara Barat”.<sup>20</sup> Dengan penghampiran kritik historis, Israil mengajukan beberapa tesis penting, antara lain (1) bahwa kedatangan agama-agama ke wilayah NTB umumnya berlangsung damai; namun, secara sosiologis, (2) dinamika hubungan antaragama berlangsung tak selalu damai; kadang konfrontatif.

Demikianlah, berdasar telaah atas sejumlah pustaka dan beberapa hasil penelitian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa berbagai teoretisasi

---

<sup>19</sup>Penelitian yang dilakukan tahun 2004 dan difasilitasi oleh Lemlit IAIN Mataram itu berjudul *Dakwah Islamiyah dalam Perspektif Pluralisme Agama (Analisis Isi Khutbah Jumat pada Masjid-masjid di Kota Mataram)*. Versi ringkas dalam bentuk artikel dengan judul serupa dimuat di *Jurnal Tasâmuḥ* Fakultas Dakwah IAIN Mataram Volume 2 Nomor 1 (Desember, 2004): 61-78.

<sup>20</sup>Versi artikelnya dengan judul sama termuat di *Jurnal Penelitian Keislaman IAIN Mataram* Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2004): 1-16.

multikulturalisme tak cukup memberi perhatian terhadap varian keberagaman sebagai (salah satu) faktor penentu dinamika multikultural; bahwa relasi antarumat beragama bisa jadi problem fundamental dalam suatu masyarakat yang multikultur. Sedangkan untuk hasil penelitian, terkhusus di Lombok (baca: NTB), praktis belum terdapat suatu studi komprehensif tentang hubungan antaragama yang memainkan multikulturalisme sebagai suatu perpektif penghampiran.

Akhirnya, jelas di mana *state of affairs* dari penelitian ini di antara studi-studi terdahulu yang berisu senafas (*prior researches on topic*). Di tengah ketakmencukupan teoretik seputar multikulturalisme dalam konteks hubungan antaragama dan tak adanya penelitian serupa, terutama di Lombok (NTB), penelitian ini merebahkan niat baiknya untuk berikhtiar mengkaji pola-pola hubungan antaragama berbasis multikulturalisme di Lombok, tepatnya di Pemenang Timur Lombok Utara.

## **E. Metode Penelitian**

*Pendekatan.* Dengan mendudukan “hubungan antaragama”, yakni antarempat agama *plus* dua agama lokal, sebagai fokus utama bahasan (*subject matter*), penelitian kancah (*field research*) ini mematok pendekatannya dengan spirit fenomenologis.<sup>21</sup> Secara epistemologis itu relevan mengingat apa yang hendak ditelisik tak hanya fakta-fakta teramati (*observable*) seputar hubungan relasional antaragama, tetapi juga pandangan persepsional para pemeluk

---

<sup>21</sup>Tujuan metodis dari fenomenologi adalah melakukan pengelompokan secara sistematis tentang karakteristik data untuk menggambarkan watak keagamaan manusia. Fenomenologi hendak mengungkapkan elemen-elemen esensial dan tipikal dari agama. Dan itu adalah tugas deskriptif, bukan interpretatif. Pendek kata, secara metodis, ia prasyarat niscaya bagi tugas-tugas filosofis dalam menentukan esensi suatu agama. Lihat, misalnya, Clive Erricker, “Pendekatan Fenomenologis,” dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Jogjakarta: LKIS, 2002): 105-46.

tentangnyanya (informan). Diasumsikan, kesadaran persepsional itulah yang secara langsung membentuk pola-pola umum hubungan antaragama di Pemenang Timur yang dalam konteks penelitian ini hendak ditentukan model tipologisnya<sup>22</sup> berdasar kerangka pandang multikulturalisme.

Untuk teknik penedekatannya, studi kanchah ini memilih penghampiran kualitatif (*qualitative research*) karena data utamanya memang berupa data kualitatif. Mengingat fokus penghampirannya berkuat pada upaya menjawab masalah berpenanya “apa” (*what*), “bagaimana” (*how*), dan pada tingkat tertentu juga “mengapa” (*why*), maka secara metodis studi ini memilih jenis penelitian studi kasus (*case study*),<sup>23</sup> tepatnya studi kasus-tunggal (*single-case study*) dengan spesifikasi studi kasus komunitas sosial atau kemasyarakatan.<sup>24</sup>

**Data dan Sumber Data.** Data utama yang dikehendaki berkait langsung dengan apa yang telah terumuskan sebagai masalah utama penelitian, yaitu bentuk-bentuk hubungan antaragama di masyarakat Pemenang Timur yang menampilkan ko-eksistensi yang damai dan toleran lantaran—ditengarai kuat—

---

<sup>22</sup>Bentuk atau pola hubungan antaragama (yang berlangsung di lokasi studi) adalah deretan fakta religius. Sebagai salah satu fenomena keagamaan, secara fenomenologis, tentu fakta-fakta itu menyimpan makna hakiki dari religiusitas. Upaya memahami makna-makna religius itu, dalam kerangka fenomenologi, dilakukan lewat analisis komparatif, yakni mengklasifikasi, mengkategorisasi, dan mengelompokkan berbagai data yang berbeda untuk kemudian membandingkannya menurut klasifikasi dan kategori masing-masing sehingga dapat diperoleh suatu perspektif menyeluruh mengenai isi serta nilai-nilai religius yang termuat di dalamnya. Selanjutnya itu menuntun pada pengenaan model tipologis atas hasil-hasil. Tipe-tipe yang tersusun/terbentuk dari kriteria (unsur-unsur, ciri-ciri, aspek-aspek, dan sejenisnya) fakta-fakta religius itu sendiri memiliki referen-referen yang bisa ditemukan dalam dunia empiris atau dapat dikonklusi secara sah dari evidensi empiris, atau keduanya. Tipe-tipe yang tersusun itu bukan saja menyediakan cara untuk pengaturan data, tapi juga pada akhirnya berguna untuk membantu generalisasi. Lihat Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, terj. Kelompok Studi Agama “Driyarkara” (Jogjakarta: Kanisius, 1995), 21-43; bdk., juga dengan Erricker, “Pendekatan...”: 105-46.

<sup>23</sup>Alasan teoretiknya menyandar ke Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

<sup>24</sup>Ita adalah satu dari enam tipologi *single-case studies* hasil klasifikasi R.C. Bogdan dan S.K. Bilen dalam bukunya, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982).

melibatkan nilai-nilai multikulturalisme sehingga bernilai produktif bagi kuatnya kohesivitas sosial di sana.

Selain pada hasil observasi dan data dokumen, penggalian data terkait digantungkan pada informan utama (*key informant*) yang dipilih secara purposif (*purposive*), yakni didasarkan terutama pada signifikansi peran (kapasitas dan intensitas) mereka dalam mengawal dinamika hubungan antaragama sekaligus menjaga segenap pranata sosial di Pemenang Timur. Informan utama dimaksud adalah para pemuka empat komunitas agama dan juga para elit desa lainnya, yakni para tuan guru dan ustadz (Islam), pedanda (Hindu), pendeta (Kristen), bhiksu (Buddha), para *toaq lokaq* (tetua desa), elit pemerintahan desa (seperti *kliang dusun* dan kepala desa).

***Pengumpulan Data.*** Adapun teknik penggalian data dijalankan dengan tiga cara, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Secara umum, teknik observasinya dijalankan dengan strategi tak langsung dan, dalam beberapa hal, terlibat-langsung (*participant observation*) dengan pola *combinative* berstruktur dan tidak berstruktur. Secara khusus, beberapa teknik observasi dipinjam dari khazanah metodologis ala *Participatory Action Research* (PAR), tepatnya *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yakni *social-religious mapping* dan *trans-sector*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Mengenai pengertian berikut operasionalisasinya, lihat Abdullah Faishol, dkk., *Metode dan Teknik Kuliah Kerja Nyata Transformatif: Implementasi Participatory Action Research (PAR) & Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Aksi Perubahan Sosial* (Surakarta: P3M STAIN Surakarta, 2006), 117-26.

Untuk metode wawancara, penerapannya dilakukan dengan pola campuran (bebas-terpimpin) dengan kategori *depth interview* (wawancara mendalam).<sup>26</sup> Seluruh wawancara dijalankan berdasar *interview guide* dengan pola semi terstruktur.<sup>27</sup>

Sementara metode dokumentasi<sup>28</sup> digunakan untuk menjaring data-data tertulis, yang dalam hal ini terkategori data sekunder, meliputi data seputar teoretisasi multikulturalisme dan data tertulis lain yang mendukung fokus penelitian, seperti data kuantitatif terkait. Data kuantitatif sendiri digunakan demi memperkaya sekaligus mempertajam analisis atas data kualitatif yang terkategori data utama. Penerapan metode dokumentasi ini, secara khusus, untuk memperkaya perolehan data wawancara dan observasi.

**Analisis Data.** Sejalan dengan pola penghampiran yang digunakan, data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kritis dengan logika induktif-abstraktif.<sup>29</sup> Dalam hal ini, upaya konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi terhadap data dikembangkan atas dasar data itu sendiri dengan berlandas-tumpu pada logika yang bertolak dari sekumpulan realitas khusus menuju teoretisasi kenyataan yang bersifat umum. Penggunaan analisis

---

<sup>26</sup>Model wawancara yang digunakan sebagai metode pengumpul data di sini hasil elaborasi atas pemerian Suharsimi Arikunto dalam *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 145-6. Secara keseluruhan, terutama untuk *deep level interview*, wawancara dilakukan lebih sebagai diskusi di mana para informan diposisikan lebih sebagai mitra dialog demi kepentingan pengayaan materi.

<sup>27</sup> Mengingat wawancara dilakukan secara bebas-terpimpin, maka pedoman wawancaranya diturunkan dalam bentuk *draft* atau kisi-kisi secara garis besar seputar persoalan terkait dengan pola semi terstruktur. Pada praktiknya, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang telah terstruktur, lalu satu demi satu diperdalam secara ekstensif-eksploratif. Dengan begitu, semua kategori ajuan tercakupi oleh jawaban-jawaban yang lengkap, kaya, dan mendalam. Bdk. *Ibid.*, 145-6 dan 231-2.

<sup>28</sup>Makna terapan dari teknik dokumentasi ini diadaptasi dari *Ibid.*, 61.

<sup>29</sup>Basis teoretiknya bersandar pada Sanapiah Faisal, "Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif," dalam Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003): 64-79.

deskriptif ini merupakan konsekuensi dari pilihan atas studi kasus itu sendiri yang *categorically* merupakan penelitian deskriptif.

Untuk teknik analisis, secara khusus menerapkan analisis komparatif, tepatnya teknik Analisis Komparatif Konstan (*Constant Comparative Analysis*).<sup>30</sup> Hasil komparasi antarpersepsi keagamaan para pemeluk mengenai hubungan antaragama (*das sein* maupun *das sollen*) dijadikan pendasaran logis untuk menentukan tipologi masing-masing, tentu saja dengan memperhatikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada. Akhirnya, segenap hasil analisis data, termasuk hasil komparasi ini, dijadikan alas penentu model hubungan antaragama berbasis multikulturalisme seperti apakah yang tengah berlangsung di lokasi penelitian.

**Validasi Data.** Guna menguji kesahihan (*validity*) data dilakukan tiga cara.<sup>31</sup> *Pertama*, triangulasi yang difokuskan pada penerapan ketiga metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi). *Kedua*, kecukupan referensial yang diterapkan terutama demi kepentingan memperkaya data hasil studi dokumentasi. *Ketiga*, pengayaan dengan melibatkan sejawat yang dilakukan untuk mengoreksi data, memperkaya detail sekaligus mempertajam analisis. Seluruh upaya validasi

---

<sup>30</sup>Lantaran menerapkan logika induktif secara ketat dalam proses analisisnya, teknik Analisis Komparatif Konstan ini terbilang paling ekstrem dalam menjalankan strategi analisis deskriptif dibanding teknik analisis kualitatif lainnya. Dalam prosesnya, mengutip B.G. Glaser dan A.L. Strauss, teknik ini melangsungkan beberapa tahap analisis, yakni (1) tahap membandingkan hal-hal yang dapat diterapkan pada tiap kategori, (2) tahap memadukan kategori-kategori itu berikut ciri-cirinya, (3) tahap membatasi lingkup teori, dan (4) tahap melakukan teoretisasi/membangun teori. Selengkapnya lihat Burhan Bungin, "Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial," dalam Bungin (ed.), *Analisis...: 100-5*; bdk. dengan Aswarni Sudjud sebagaimana dikutip Arikunto, *Prosedur...*, 247-8.

<sup>31</sup>Moeleong sendiri menawarkan tujuh pilihan langkah untuk menguji validitas data, yakni (1) perpanjangan waktu penelitian, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota. Lihat Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2001), 75. Untuk kepentingan terkait, studi ini menggunakan tiga di antaranya.



ini diterapkan demi menjamin reliabilitas data yang diperoleh berikut hasil-hasil olahannya berupa kategorisasi analisis, interpretasi, dan simpulan hasil penelitian.

## **F. Sistematika Bahasan**

Agar segenap ulasan tersaji sistematis, laporan hasil studi ini diturunkan dalam empat bab bahasan. Uraian dimulai dengan Pendahuluan yang ditempatkan di bab *pertama*. Bagian ini mencakup latar belakang dan fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah atas studi-studi terdahulu (kajian pustaka), prosedur metodologis yang diterapkan, dan sistematika bahasan ini sendiri.

Pada bab *kedua*, ulasan khusus menyangkut kerangka konseptual yang digunakan sebagai perspektif teoretik dalam memaknai seluruh data temuan. Dalam hal ini, multikulturalisme didudukkan sebagai perspektif utama pemaknaan. Melalui pemaknaan itu pula, perspektif multikulturalisme digunakan sebagai kerangka tipefikasi, yakni proses penentuan tipologi multikulturalisme dari realitas hubungan antarkomunitas agama di lokasi studi.

Adapun bab *ketiga* merupakan bagian utama atau inti dari bahasan penelitian ini. Mula-mula dikemukakan data antaran untuk mengenal profil desa Pemenang Timur. Lalu, diturunkan ulasan seputar demografi keagamaan berikut bentuk-bentuk hubungan antarkomunitas agama di lokasi penelitian yang kemudian dipindai spiritnya dengan perspektif multikulturalisme.

Dalam pada itu juga diungkap sejumlah ancaman aktual dan potensial yang menghantui harmoni dan kohesi sosial antarkomunitas agama di desa tersebut sekaligus menakar sejauh mana negara, antara lain melalui institus pemerintahan desa setempat, berperan produktif—atau sebaliknya, kontraproduktif—dalam

penguatan spirit multikulturalisme dalam hubungan antarkomunitas. Seluruh temuan kemudian dipancang sebagai titik anjak untuk menentukan tipologi multikulturalisme seperti apa yang dilangsungkan oleh segenap komunitas agama di Pemenang Timur dalam membangun hubungan antarmereka.

Akhirnya, bab *keempat*, seluruh ulasan diakhiri dengan Penutup. Di sini diketengahkan sejumlah simpulan penelitian dan beberapa saran terkait.[]

## **BAB II**

### **MULTIKULTURALISME SEBAGAI PERSPEKTIF**

GAGASAN multikulturalisme, terkhusus sejak paruh kedua 1970-an, telah menjadi topik bincang utama dalam diskursus kebudayaan mutakhir. Signifikansinya sebagai sebuah ide tentang bagaimana memaknai multikulturalitas semakin kerap mewarnai dinamika politik dan kebudayaan masyarakat kontemporer yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi, termasuk dalam hal agama dan keberagamaan, seperti di lokasi penelitian ini.

Dalam konteks penelitian ini, heterogenitas agama dan keagamaan itulah yang hendak dimaknai dari perspektif multikulturalisme. Pengenaannya sebagai perspektif bukan semata-mata lantaran ia telah menjadi “*trending topic*” dalam kajian kebudayaan mutakhir, melainkan karena ia lebih relevan sebagai perspektif pembacaan terhadap realitas hubungan antarkomunitas agama dibanding pluralisme. Untuk itu uraian di bagian ini akan berkonsentrasi pada teoretisasi seputar multikulturalisme berikut sejumlah tipologi masyhurnya dalam *discourse* politik kebudayaan terkini.

#### **A. Melampaui Pluralisme**

Pertama-tama harus ditegaskan beda pluralisme dari multikulturalisme. Banyak orang menganggap sama atau merancukan keduanya, padahal berbeda secara substantif. Hal pembeda paling mendasar ada pada tujuan akhir keduanya: pluralisme menghendaki “penyatuan” antarentitas yang plural, sedang

multikulturalisme berupaya mewujudkan “persatuan” di antara berbagai entitas budaya (termasuk agama) yang berbeda-beda.

Pluralisme hanya sebuah pengakuan teoretik terhadap kemajemukan, kebhinnekaan, atau keanekaragaman. Dalam konteks pluralisme, beragam suku, ras, agama, atau kelompok-kelompok budaya diakui sebagai kenyataan yang berbeda-beda dan dihargai. Namun, bagaimana interaksi di antara berbagai keragaman itu di mana aneka pertukaran, negosiasi, komunikasi, bahkan gesekan yang berlangsung di dalamnya cenderung luput dari perhatian. Konsep pluralisme menawarkan eksistensi berbagai komunitas “majemuk”, tetapi gagal menggambarkan bagaimana karakter “majemuk” tersebut berhubungan. Tak ter jelaskan bagaimana multiplisitas tersebut distrukturisasi dan hubungan antarkomunitas yang majemuk tersebut terjalin. Pada akhirnya, “majemuk” sering direduksi menjadi “satu” melalui proses “penyatuan”.<sup>32</sup>

Multikulturalisme melangkah lebih jauh dalam memaknai masyarakat majemuk. Jika pluralisme semata-mata merepresentasikan “kemajemukan”, maka multikulturalisme mengakui dan mendorong eksistensi “kemajemukan” secara sederajat (*equality*) di ruang publik. Tidak sebagaimana pluralisme, multikulturalisme mendorong pemikiran diversitas tentang jenis-jenis yang berbeda, masing-masing mengandung nilai intrinsik, dan karena itu semua jenis keragaman itu tidak dapat disepadankan atau dilebur menjadi satu. Masing-masing dipandang sebagai subjek yang mempunyai hak untuk hidup bersama, berkembang dan merealisasikan diri dengan cara terbaik. Singkatnya, konsep pluralisme tidak menjamin apakah kehadiran majemuk akan dan telah

---

<sup>32</sup>Lihat Gurpreet Mahajan, *Rethinking Multiculturalism*, dalam <http://www.india.seminar.com/1994>. (17 Juni 2013).

diperlakukan secara setara (*equal*) oleh negara, misalnya, sedangkan multikulturalisme, sebaliknya, justru menawarkan kesetaraan di ruang publik.<sup>33</sup>

Soal equalitas, kesetaraan antaretnitas kemajemukan, memang menjadi isu utama dalam multikulturalisme. Sebagai sebuah filosofi, ia menghendaki adanya persatuan antarberbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama-setara dalam masyarakat modern. Secara teknis, ia acap pula digunakan untuk menggambarkan “kesatuan”, bukan ”penyatuan”, berbagai kelompok yang berbeda pada masyarakat dalam suatu negara.<sup>34</sup> Persatuan antarkeberbagaian itu dimungkinkan mengingat, sebagai sebuah ideologi, ia mengakui dan mengagungkan dan menempatkan seluruh keberbedaan itu dalam kesederajatan baik secara individual maupun kultural.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, ia memiliki relevansi konseptual dengan diskursus lain seperti demokrasi, keadilan, penegakan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku-bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku-bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, dan hak budaya komunitas (terutama yang minoritas).<sup>36</sup> Alhasil, ia

---

<sup>33</sup> Lihat Ridwan al-Makassary, “Pengarusutamaan Multikulturalisme bagi Masyarakat Islam Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Aksi,” Makalah pada *Annual Conference on Islamic Studies 2007* di Pekanbaru Riau, 21-24 Nopember 2007: 1-19.

<sup>34</sup> Oleh karena itu, tak hanya terhadap pluralisme, ia juga berlawanan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara-bangsa (*nation-state*) sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif. Istilah “monokultural” juga kerap dipakai untuk menggambarkan homogenitas yang belum berwujud (*pre-existing homogeneity*). Sementara, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antardua atau lebih kebudayaan berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru. Lihat seutuhnya Neil Bissoondath, *Selling Illusions: The Myth of Multiculturalism* (Toronto: Penguin, 2002).

<sup>35</sup> Ini frase Brian Fay dan C.W. Watson sebagaimana dikutip Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural,” Makalah pada *Simposium Internasional Bali ke-3 Jurnal Antropologi Indonesia* di Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.

<sup>36</sup> *Ibid.*

dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat di dunia modern secara umum.

Hingga di sini, dapatlah ditegaskan bahwa multikulturalisme adalah suatu terminologi yang lazim digunakan untuk tiga hal khusus, yaitu *pertama*, sebuah deskripsi tentang diversitas kultural di dalam suatu masyarakat; *kedua*, sebagai sebuah ideologi yang bertujuan untuk melegitimasi “perpaduan” diversitas kelompok-kelompok budaya dalam struktur umum masyarakat; dan *ketiga*, sebagai kebijakan publik yang didesain untuk membentuk persatuan nasional di tengah diversitas etnik, agama, dan seterusnya.<sup>37</sup>

## **B. Lima Tipologi**

Khusus menyangkut kebijakan publik, multikulturalisme mengandaikan masing-masing warga negara harus memelihara budayanya sendiri sembari hidup berdampingan secara damai bersama warga lain yang berlainan budaya.<sup>38</sup> Dengan kebijakan itu, negara tidak menumpas keragaman kultural, tidak juga berupaya mengaduk-leburkan potensi-potensi kultural warganya, melainkan menyediakan sebuah arena tempat perbedaan kultural menjadi asas. Negara menjadi institusi yang berdiri tegak menjamin perbedaan-perbedaan itu tidak saling meminggirkan. Kebijakan berspirit multikulturalisme berikhtiar menciptakan konfigurasi kebudayaan nasional yang tersusun dari sekian ragam budaya lebih sebagai sebuah mozaik kultural dan bukan sebuah entitas yang utuh, tunggal, dan seragam. Khusus dalam konteks kehidupan beragama, kebijakan politik berbasis

---

<sup>37</sup>Simon Bekker dan Anne Leilde, “Is Multiculturalism a Workable Policy in South Africa,” dalam John Rex dan Gurharpal Sing (eds.), *Governance in Multicultural Societies* (London: Ashgate Publishing Limited, 2004), 157.

<sup>38</sup>*Ibid.*

multikulturalisme itu jelas menolak diskriminasi dan pengebirian ruang gerak agama, misalnya kebijakan “enam agama resmi” yang jelas-jelas melecehkan hak kebebasan beragama warga negara dalam menghayati agama sesuai keyakinan masing-masing.

Ide multikulturalisme belakangan kian mengemuka sebagai pandangan dunia (*world view*) yang kemudian diwujudkan dalam *politics of recognition*. Dalam konteks ini, merujuk Parekh,<sup>39</sup> multikulturalisme memilah tegas pada lima macam tipologi. *Pertama*, multikulturalisme isolasionis. Menunjuk pada suatu masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi minimalis satu sama lain. *Kedua*, multikulturalisme akomodatif. Berlangsung pada masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural minoritas berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan sembari mengangankan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Fokus perhatian kelompok-kelompok kultural ini adalah bagaimana mewujudkan hak mempertahankan cara hidup mereka sebagaimana kelompok kultural dominan miliki. Mereka menentang dominasi kelompok kultural tertentu dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra sejajar.

Kemudian, *keempat*, multikulturalisme kritis atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu *concern*

---

<sup>39</sup>Lihat Bikhu Parekh, “National Culture and Multiculturalism”, dalam Kenneth Thomson (ed.), *Media and Cultural Regulation* (London: Sage Publications, 1997), 148.

dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Terakhir, *kelima*, multikulturalisme kosmopolitan, yakni paham yang berusaha menghapuskan batas-batas kultural guna menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung multikulturalisme jenis ini umumnya adalah intelektual diasporik dan kelompok-kelompok liberal yang berkecenderungan postmodernis. Mereka memandang segenap budaya sebagai *resources* yang dapat dipilih dengan bebas.

Di atas semuanya, seluruh teoretisasi multikulturalisme bermuara di tujuan senada, yakni keinginan membawa masyarakat ke dalam kerukunan dan perdamaian, tanpa ada konflik dan kekerasan, kendatipun di dalamnya terdapat kompleksitas perbedaan latar budaya, disparitas sejarah, suku, ras, bangsa, golongan, dan agama.<sup>40</sup> Masyarakat yang multikultural sedemikian dipahami sebagai tidak homogen, tetapi berkarakteristik heterogen di mana relasi sosial dalam masyarakat berlangsung penuh toleran, tersemangati oleh kesediaan hidup berdampingan secara damai dan masing-masing individu saling menenggang bentuk-bentuk disparitas kultural di antara mereka.

Dengan *spirit* mencipta kerukunan, kedamaian, dan kohesivitas sosial suatu masyarakat, multikulturalisme dengan sendirinya juga merupakan suatu strategi memperkuat integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya benar-benar diakui dan dihormati sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam menyikapi,

---

<sup>40</sup>Lihat Thontowi, "Multikulturalisme...", 16-7.



misalnya, isu-isu separatisme dan disintegrasi sosial. Pengenaaan multikulturalisme potensial berperan solutif mengingat ia meniadakan asumsi tentang adanya kelompok *dominant* dan *subordinate* dalam setiap relasi sosial; setiap kelompok dan individu berpeluang sama dalam mengekspresikan diri dan saling bekerja sama serta mencipta kohesi sosial bersama-sama pula. Setiap kelompok di masyarakat dituntut untuk saling menghormati; masing-masing bebas mengekspresikan pilihan-pilihan kulturalnya, termasuk agama, tanpa ketakutan dan keterancaman. Resiprositas penghormatan tersebut dilakukan berlandaskan pengetahuan dan pemahaman terhadap budaya lain tanpa menjadikan budayanya sendiri sebagai tolok ukur kebenaran tunggal-hegemonik bagi kebudayaan lain. Itulah mengapa multikulturalisme acap pula disebut sebagai suatu ideologi yang berupaya meneguhkan kesederajatan di tengah perbedaan.<sup>41</sup> Kemungkinan ke arah itu terbuka lantaran ruh fundamental dari multikulturalisme sendiri, yaitu kebersediaan menerima individu atau kelompok lain sebagai suatu “kesatuan” yang meng-atasi seluruh diversitas budaya.

Sementara, terkait seluruh realitas aktual (termasuk yang potensial) dari konflik-konflik berdimensi etnis dan agama (*ethno-religious*), menghadirkan multikulturalisme sebagai spirit penyikapan menjadi niscaya. Namun, haruslah dipahami bahwa multikulturalisme sejatinya bergerak di level kesadaran. Fokusnya adalah menumbuhkan refleksi dan sikap empatik atas segenap dimensi keberbedaan. Untuk itu, dalam konteks kepentingan persebaran wacana dan

---

<sup>41</sup> Parsudi Suparlan, “Multikulturalisme sebagai Modal Dasar bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia,” Makalah pada *Sarasehan Nasional: Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Indonesia*, diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syahid Jakarta, 8 September 2004.



Prasangka teoretiknya berpangkal dari satu postulat bahwa masyarakat selalu heterogen, berpuspa ragam. Keanekaragaman itu terutama bisa dijumpai lewat konstruk budaya masyarakat itu sendiri. Budaya atau kebudayaan berperan determinan dalam membentuk konfigurasi sosial-keagamaan. Multikulturalisme mengidentifikasi masyarakat tersebut sebagai masyarakat multikultural, yakni masyarakat yang menyusun modus eksistensial diri dari beragam anasir kebudayaannya sendiri sekaligus membangun seluruh relasi sosial di dalamnya dengan spirit multikulturalisme.

Salah satu anasir terpenting kebudayaan adalah agama. Dalam masyarakat Sasak Lombok yang begitu “religius”, termasuk di Pemenang Timur, agama bahkan menjadi wajah paling familiar dari apa yang disebut kebudayaan orang Sasak. Ini bersifat kausal, mengingat setiap kali agama hadir di tengah situasi budaya tertentu, ia senantiasa mengalami relasi dialektik yang niscaya dengan seluruh realitas yang melingkupinya. Demikian pula sebaliknya. Ujung-ujungnya, sungguh susah membedakan secara tegas (*clear-cut*) antara budaya dan agama. Dengan kata lain, kedua entitas itu sejatinya saling melandasi satu sama lain. Pada setiap kawasan budaya, sistem religi masyarakatnya adalah bagian tak terpisahkan dari sistem budaya mereka secara keseluruhan. Demikian pula segenap sistem, pola, dan etos budaya yang berlaku di sana, turut mempengaruhi terbentuknya penghayatan religiusitas mereka, mulai simbol hingga coraknya.

Agama, dalam makna sedemikian, tampil sebagai unsur terpenting yang membentuk karakter fundamental dari masyarakat multikultural. Dalam pada itu, seluruh relasi sosial di dalamnya berlangsung dengan spirit multikulturalisme. Basis epistemologis sekaligus ontologis dari nilai-nilai multikulturalisme terutama

menunjuk pada dua isu dasarnya sendiri, yaitu kebudayaan (*culture*) dan kesederajatan (*equality*).<sup>42</sup> Ini bisa dirunut dari kepentingan utama multikulturalisme, yakni kesederajatan beragam entitas budaya yang berkontestasi di ruang publik. Tegas kata, dalam multikulturalisme, budaya selalu berkait rekat dengan equalitas. Tanpa equalitas, maka keanekaragaman budaya (termasuk agama) hanya akan berhenti sebagai kenyataan belaka.

Kelindan antara agama (-agama) dan spirit multikulturalisme selanjutnya membentuk apa yang disebut keberagamaan multikultural. Secara paradigmatis, model keberagamaan sedemikian membentuk karakter dasar dari dan terefleksi dalam hubungan antaragama pada masyarakat multikultural. Selanjutnya, dari hubungan antaragama berkarakter multikultural itu dapat ditelusuri model hubungan antaragama berbasis multikulturalisme seperti apakah yang tengah berlangsung dalam masyarakat multikultural. Artinya, melalui penelaahan atas bentuk-bentuk hubungan antaragama itu model hubungannya bisa ditentukan. Penentuan model di akhir ini sekaligus menegaskan bahwa penerapan rangka teoretik tersebut secara keseluruhan bergerak dari bawah, tepatnya dari ajuan fakta-fakta menuju ke tipifikasi lalu ke penentuan model—dan bukan sebaliknya.

Apa yang berkali disebut di sini sebagai hubungan antaragama berbasis multikulturalisme mengandaikan suatu hubungan di mana masing-masing penganut agama yang berbeda-beda memelihara karakter keberagamaannya sendiri sembari hidup berdampingan secara damai. Dengan cara itu, koeksistensi yang terbangun tidak serta-merta menumpas keragaman, tidak juga lahir dari upaya mengaduk-leburkan berbagai diferensi keberagamaan. Situasi hubungan

---

<sup>42</sup>Al-Makassary, "Pengarutamaan..." 10-3.

yang berlangsung justru menyediakan sebuah arena tempat perbedaan-perbedaan keberagaman saling berinteraksi sehingga bernilai produktif bagi equalitas antaragama. Seluruh identitas keberagaman yang ada saling berdialog, berinteraksi, saling bertukar-tempat dan posisi. Dalam konteks itu, hubungan antaragama menjadi gelanggang kontestasi di mana berbagai macam posisi dimungkinkan untuk diraih dan segudang makna dapat diperoleh.<sup>43</sup>

Lalu, bagaimana halnya dengan realitas hubungan antarkomunitas agama di desa Pemenang Timur kecamatan Pemenang kabupaten Lombok Utara, lokasi penelitian ini? Adakah komunitas-komunitas agama di desa tersebut tengah melangsungkan suatu relasi sosial bertendensi memainkan multikulturalisme sebagai spirit utama? Ulasan di bab lanjut berikhtiar menjawabnya.[]

---

<sup>43</sup> Inilah yang oleh sementara orang disebut proses hibridisasi, suatu translasi kultural, atau tepatnya, proses multikulturalisasi. Lihat Baso, *Plesetan...*, 103.

**BAB III**  
**SPIRIT MULTIKULTURALISME**  
**DALAM HUBUNGAN ANTARKOMUNITAS AGAMA:**  
**PEMAKNAAN DAN TIPOLOGI**

**H. Profil Desa**

Desa Pemenang Timur adalah salah satu dari 4 desa yang berada di wilayah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara<sup>44</sup>, yakni Desa Pemanang Timur sendiri, Desa Pemenang Barat, Desa Malaka, dan Desa Giri Indah). Adapun luas keseluruhan wilayah Desa Pemenang dalam KM<sup>2</sup> adalah 12,28 KM<sup>2</sup>. Sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan dengan luas wilayah mencapai 455 ha/m<sup>2</sup>, kemudian diikuti persawahan dengan luas wilayah sebesar

---

<sup>44</sup> Kabupaten Lombok Utara (disingkat KLU) sebenarnya adalah sebuah pemerintahan kabupaten pemekaran berdasarkan UU RI No. 26 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.52-1001 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Lombok Utara di Provinsi NTB, yakni DRS. H. LALU BAKRI Sebagai Penjabat Bupati Lombok Utara yang dilantik pada tanggal 30 Desember 2008 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden RI. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 809,53 KM<sup>2</sup> dan secara administratif terbagi menjadi lima kecamatan dengan 33 desa dan 322 dusunnya. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bayan (kecamatan terluas dengan luas wilayahnya 329,10 KM<sup>2</sup> atau 32.910 ha [setara dengan 40.66% luas kabupaten] dengan 9 desa dan 33 dusun), Kecamatan Gangga (luas 157.35 KM<sup>2</sup> atau 15.735 ha [setara 19.43% luas kabupaten] dengan 5 desa dan 54 dusun), Kecamatan Kayangan (luas 126.53 KM<sup>2</sup> atau 12.635 ha [setara 15.61% luas kabupaten] dengan 8 desa dan 85 dusun), Kecamatan Pemenang (kecamatan terkecil dengan luas wilayah 81,09 KM<sup>2</sup> atau 8.109 ha [setara 10.02% luas kabupaten] dengan 4 desa dan 29 dusun), dan Kecamatan Tanjung (luas 115.64 KM<sup>2</sup> atau 11.564 ha [setara 14.28% luas kabupaten] dengan 7 desa dan 65 dusun). Kecamatan yang terakhir ini (Tanjung) merupakan ibu kota KLU. Saat ini KLU dipimpin oleh H. Djohan Sjamsu, S.H. sebagai Bupati I dan H. Najmul Akhyar, SH, MH. Sebagai Wakil Bupati. Sebelum menjadi daerah pemekaran pemerintah kabupaten, KLU merupakan bagian dari Kabupaten Lombok Barat dengan 15 kecamatan wilayah administratif (Kecamatan Bayan, Gangga, Kayangan, Tanjung, Pemenang, Gunungsari, Batulayar, Narmada, Lingsar, Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar dan Sekotong Tengah). Informasi ini disarikan dari “Sejarah Singkat Kabupaten Lombok Utara” dalam <http://www.lombokutarakab.go.id/html/profil-daerah/sejarah-singkat> diakses pada tanggal 20 Nopember 2013; dan “Kabupaten Lombok Utara” dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lombok\\_Utara](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Utara) diakses pada tanggal 20 Nopember 2013 dan BPS Kabupaten Lombok Barat 2010.

185 ha/m<sup>2</sup>, dan luas pemukiman yang hanya menempati jumlah luas sebesar 56 ha/m<sup>2</sup>. Hal ini terlihat pada data tabel berikut:

Tabel 1  
Luas Wilayah Menurut Penggunaan

<b>Penggunaan</b>	<b>Luas</b>
Pemukiman	56 ha/m <sup>2</sup>
Persawahan	185 ha/m <sup>2</sup>
Perkebunan	455 ha/m <sup>2</sup>
Kuburan	..... ha/m <sup>2</sup>
Pekarangan	..... ha/m <sup>2</sup>
Taman	..... ha/m <sup>2</sup>
Perkantoran	..... ha/m <sup>2</sup>
Prasarana umum lainnya	..... ha/m <sup>2</sup>

Sumber data: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan tahun 2012, hal. 2

Berbasarkan “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Desa Pemenang Timur”, topografi Desa Pemenang Timur ada yang menempati daerah dataran rendah, yakni seluas 185 ha/m<sup>2</sup>; dan ada yang menempati daerah yang berbukit-bukit, yakni seluas 455 ha/m<sup>2</sup>; serta sebagian daerah yang berada di daerah pesisir/tepi pantai. Desa Pemenang Timur ini tidak ada yang berlokasi di bagian dataran tinggi (pegunungan) atau bahkan di bagian lereng gunung sekalipun. Desa ini juga tidak terdapat dilokasi kawasan rawa, gambut, aliran sungai atau bahkan bantaran sungai. Jika dilihat dari kawasan perkantoran atau pusat bisnis, maka Desa Pemenang Timur ini termasuk berada dalam kawasan perkantoran dan pusat pertokoan dan bisnis.<sup>45</sup> Bahkan jika dilihat dari lokasi pusat pemerintahan, Desa Pemenang Timur ini hanya berjarak 1 KM dari kota kecamatan dan 7 KM dari

<sup>45</sup> Dokumen “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan” Desa Pemenang tahun 2012, hal. 4.

kota kabupaten atau setara dengan  $\pm$  30 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua; serta 25 KM dari ibu kota propinsi NTB atau setara dengan  $\pm$  90 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua.

Adapun batasan wilayah dari Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara ini adalah Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang di bagian sebelah utara; Desa Geripak Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat di bagian sebelah selatan; Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara di bagian sebelah timur; dan Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara di bagian sebelah barat.

Jumlah penduduk Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara secara keseluruhan adalah 8.527 jiwa yang terdiri dari 4.302 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.225 jiwa berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) secara keseluruhan adalah 2.451 KK.<sup>46</sup> Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara adalah petani dan buruh pertanian, buruh peternakan, nelayan, buruh usaha perikanan, tukang jahit, karyawan perusahaan swasta, dan sektor jasa. Secara keseluruhan mata pencaharian penduduk Desa Pemenang Timur ini dapat dilihat dalam tabel olahan data mata pencaharian penduduk berikut:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal 18.



Tabel 2  
Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Pemenang Timur  
Kecamatan Pemenang KLU Menurut Sektor tahun 2012

<b>Jenis Mata Pencaharian/Pekerjaan</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>
Petani	602 jiwa
Buruh Tani	431 jiwa
Buruh Usaha Peternakan	11 jiwa
Nelayan	10 jiwa
Buruh Usaha Perikanan	26 jiwa
Tukang Jahit	7 jiwa
Karyawan Perusahaan Swasta	435 jiwa
Buruh Usaha Jasa Transportasi	41 jiwa
PNS	105 jiwa
TNI	3 jiwa
POLRI	1 jiwa
Dosen (swasta)	1 jiwa
Pensiunan PNS	9 jiwa
Seniman/artis	2 jiwa
Pembantu Rumah Tangga	82 jiwa
Sopir	30 jiwa
Wiraswasta	268 jiwa
Pengacara	1 jiwa
Notaris	1 jiwa

Sumber Data: Diolah dari Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Pemenang Timur tahun 2012, hal. 12-14.

Berdasarkan tabel di atas, mata pencaharian penduduk Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara mayoritas berada pada sektor pertanian, yakni sebagai petani sebanyak 602 orang dan buruh pada sektor pertanian sebanyak 431 orang. Kemudian hal ini disusul oleh sektor perindustrian (perusahaan) sebagai buruh/karyawan perusahaan swasta, yakni sebanyak 435 orang, wiraswasta sebanyak 268 jiwa dan PNS sebanyak 105 orang.

Sedangkan dalam persoalan pendidikan, penduduk Desa Pemenang Timur dapat dikatakan sudah cukup bagus, mengingat bahwa ada di antara warga/penduduknya yang menjadi dosen di salah satu perguruan Tinggi swasta di NTB. Selain itu, terdapat 7 warga yang telah menamatkan pendidikan strata magister dan 2 warga telah menamatkan pendidikan strata doctor (S-3). Untuk lebih jelasnya, mengenai pendidikan warga Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3  
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pemenang Timur  
Kecamatan Pemenang KLU tahun 2012

Jenjang Pendidikan	Jumlah Jiwa		
	Laki	Perempuan	Total
SD/Sederajat	1.144 (53%)	1.013 (47%)	2.177
SLTP/Sederajat	611 (55%)	509 (45%)	1.120
SLTA/Sederajat	671 (55%)	552 (45%)	1.223
D-2	51 (57%)	38 (43%)	89
D-3	23 (61%)	15 (39%)	38
S-1	76 (64%)	43 (36%)	119
S-2	7		7
S-3	2		2
<b>Total</b>	<b>2.585</b>	<b>2.170</b>	<b>4.755</b>

Sumber Data: Diolah dari “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan” Pemenang Timur tahun 2012 hal. 19 dan “Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan” Pemenang Timur tahun 2012, hal. 16.

Berdasarkan tabel di atas bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang KLU, dapat diketahui, sebagaimana sudah disinggung pada uraian sebelumnya, bahwa jumlah keseluruhan penduduknya adalah 8.527 jiwa, sementara jumlah penduduk yang telah mengenyam pendidikan minimal tamat SD adalah berjumlah 4.755 jiwa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 58% dari penduduk Desa Pemenang Timur sudah pernah menamatkan pendidikan minimal tingkat SD/Sederajat. Jumlah ini masih belum dikurangi anak-anak yang masih dalam usia sekolah (3-18 tahun) baik pada tingkatan TK/Play Group (121 anak) dan maupun tingkat SD hingga SMA (841 siswa). Sementara berdasarkan data profil Desa Pemenang Timur, penduduk yang berusia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah mencapai 1.416 orang (508 orang berjenis kelamin laki-laki dan 908 orang berjenis kelamin perempuan), dan dengan tingkat buta huruf 8.5% atau sekitar 725 orang.<sup>47</sup>

Selain gambaran mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Pemenang Timur sebagaimana telah diuraikan, di Desa Pemenang Timur ini juga terdapat sejumlah lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Adapun lembaga pendidikan yang berlokasi di Desa Pemenang Timur ini adalah TK sebanyak tiga buah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Pemenang Timur, SD Negeri ada lima buah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, SMP 1 buah dan Tsanawiyah 1 buah (keduanya diselenggarakan oleh swasta), SMA ada tiga buah dan Aliyah 1 buah (diselenggarakan oleh swasta). Untuk lebih mudahnya, lembaga pendidikan yang ada di Desa Pemenang Timur ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>47</sup> Dokumen Profil Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang KLU tahun 2012.

Tabel 4  
Lembaga Pendidikan di Desa Pemenang Timur

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Penyelenggara
TK	3 buah	Pemdes
SMP	1 buah	Swasta
Madrasah Tsanawiyah	1 buah	Swasta
SMA	3 buah	
Madrasah Aliyah	1 buah	Swasta
Pondok Pesantren	1 buah	Swasta

Sumber Data: Diolah dari “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan” Pemenang Timur tahun 2012 hal. 35.

Sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU), masyarakat Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang juga mendasarkan falsafah hidupnya kepada ajaran-ajaran bersama yang tercermin dalam makna lambang Kabupaten Lombok Utara dan *sesanti* yang diangkat menjadi *icon* Kabupaten Lombok Utara, yakni *Tioq, Tata, Tunaq*. Untuk memberikan gambaran atas falsafah kehidupan masyarakat Pemenang Timur, berikut ini disertakan lambing Kabupaten Lombok Utara beserta makna penting dari unsure-unsur dalam lambangnya:



Dasar Hukum Keputusan Bupati Lombok Utara No.8 Tahun 2009 tanggal 27 April 2009

- Gunung Rinjani : Gunung Rinjani berwarna coklat mempresentasikan simbol yang melekat pada masyarakat Lombok Utara (sasak) pada umumnya dengan menyebutnya sebagai DAYA atau pusat kekuatan magnet bumi dan pusat kekuatan spiritual, melambangkan keharmonisan kehidupan dalam kelestarian lingkungan.
- Bangunan Masjid Kuno : Berwarna merah menggambarkan integritas peradaban masyarakat Lombok Utara yang dibangun berdasarkan kesadaran kosmos, kesadaran sejarah, kesadaran adat dan spiritual dan merupakan situs cagar budaya.

- Lingkaran : Berwarna merah dan hijau menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Lombok Utara yang dibangun secara fungsional dan mengakomodir segenap kepentingan masyarakat secara proporsional.
- Bintang bersegi lima : Melambangkan masyarakat Lombok Utara yang religius dalam bingkai ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan RI.
- Padi dan Kapas : Menggambarkan kesejahteraan dan berkeadilan sebagai harapan masyarakat Kabupaten Lombok Utara.
- Sesanti : “ TIOQ TATA TUNAQ “ merupakan cerminan kepribadian dan semangat kerja masyarakat Lombok Utara.
- TIOQ : Berarti tumbuh bahwa masyarakat Lombok Utara menerima anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar yang harus disyukuri dan dipertanggung jawabkan.
- TATA : Berarti Atur dalam konteks ini bermakna mengelola kehidupan dan segala sumber daya yang dianugerahkan oleh Tuhan bertanggung jawab kepada Tuhan dan generasi mendatang serta berorientasi untuk membangun bersama menuju kesejahteraan

masyarakat Lombok Utara.

TUNAQ : Berarti Menyayangi, memelihara, mendayagunakan secara maksimal segala sumber daya baik budaya, sosial dan sumber daya alam.

Kesimpulan : Setiap Penduduk dan Pemimpin di Kabupaten Lombok Utara haruslah bertindak menurut hukum, bijaksana, berbudi pekerti luhur dan tidak berlebihan, bersemangat dan berjuang untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara. Di samping itu memiliki kepribadian dan toleransi antar pemeluk agama satu dengan lainnya serta mendayagunakan segala sumber daya yang ada baik budaya, sosial dan sumber daya alam guna terwujudnya masyarakat Lombok utara yang religius dan bermartabat.<sup>48</sup>

## I. Demografi Keagamaan

Adalah menarik untuk dijadikan pembuka uraian dalam sub-bab ini, kata “**Beradab**” dalam visi Kabupaten Lombok Utara 2010-2015 yang mengangkat tema “Lombok Utara Maju dan Beradab dengan Semangat *Tioq Tata Tunaq*”. Makna kata “**Beradab**” dalam visi tersebut adalah “perwujudan keadaan

---

<sup>48</sup> Kabupaten Lombok Utara dalam <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/52/name/nusa-tenggara-barat/detail/5208/lombok-utara> diakses tanggal 20 Nopember 2013.

masyarakat yang mandiri dan maju, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, **memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama**, ditandai dengan kualitas hidup yang layak dalam kehidupan spiritual, ekonomi, sosial, dan budaya.” Bahkan dalam lima misi untuk mewujudkan visi ini, yang pertama adalah berbunyi “mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, dan **menjaga pluralitas**.”<sup>49</sup>

Gambaran mengenai visi dan misi yang menyangkut kehidupan keberagamaan di Kabupaten Lombok Utara ini ternyata sudah tercermin dalam kehidupan masyarakat Pemenang Timur Kecamatan Pemenang KLU. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, baik terhadap para tokoh agama di Desa Pemenang Timur, tokoh masyarakat, maupun terhadap pejabat pemerintahan desa setempat, diketahui bahwa kehidupan keberagamaan dan hubungan antar pemeluk agama menunjukkan adanya hubungan yang baik, harmonis, dan tidak ada konflik yang bermuara dari agama. Bahkan, dalam salah satu pengamatan, peneliti pernah mengalami sebuah pengalaman di mana ada dua rumah tinggal yang saling bertetangga dan berlainan agama di mana secara kasat mata tidak menunjukkan adanya perbedaan agama. Peneliti mengetahui bahwa mereka itu berbeda keyakinan agamanya setelah peneliti terlibat wawancara secara langsung dengan mereka.<sup>50</sup> Kondisi seperti ini juga diceritakan oleh Maknun, seorang pejabat kepala Desa Pemenang Timur, dalam kutipan wawancara berikut:

“Tentang hubungan silaturahmi [peneliti: antar pengikut agama] nyambung sekali, sama yang muslim hindu, budha. Bahkan secara...

---

<sup>49</sup> Lihat dalam Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Kabupaten Lombok Utara dalam <http://www.lombokutarakab.go.id/html/pemerintahan-klu/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 20 Nopember 2013

<sup>50</sup> Observasi dan wawancara pada tanggal 27 November 2013 di Desa Pemenang Timur.



kasat mata, kita perhatikan tidak ada bedanya, karena sangkin dekatnya gitu.”<sup>51</sup>

Pada dasarnya, mayoritas masyarakat Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang KLU adalah pengikut agama Islam. Namun, ternyata ada hal menarik yang menunjukkan fakta terdapat 3 jenis agama lainnya, yaitu Budha, Hindu, dan Kristen. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan agama-agama yang berkembang di Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang KLU beserta jumlah pengikutnya:

Tabel 5  
Agama Yang Dianut Masyarakat Desa Pemenang Timur

Jenis Agama	Jumlah Jiwa		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Islam	3.614	3.507	7.121
Kristen	3	4	7
Katholik	-	-	-
Hindu	166	178	344
Budha	519	536	1.054
Khonghucu	-	-	-
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-	-	-
Aliran Kepercayaan lainnya	-	-	-

Sumber Data: Diolah dari “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan” Pemenang Timur tahun 2012 hal. 20.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa agama Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang

<sup>51</sup> Maknun (Kepala Desa Pemenang Timur), *Wawancara*, di Kantor Kepala Desa pada tanggal 27 Nopember 2013.

KLU. Pengikut agama Islam ini kurang lebih mencapai 84% dari total penduduk Desa Pemenang Timur (8.526 jiwa). Sedangkan pengikut agama yang terbanyak kedua adalah pengikut agama Budha yang mencapai 12.4% dari total penduduk Desa Pemenang Timur tersebut. Selanjutnya, peringkat ketiga disusul oleh pengikut agama Hindu yang mencapai 4% dari total penduduknya. Kemudian, yang terakhir diduduki pengikut agama Kristen dan hanya sebanyak tujuh orang saja. Selain fakta ini, bahwa di Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang semua agama juga mempunyai tempat ibadah masing-masing kecuali agama Kristen. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel  
Tempat Ibadah Masyarakat Desa Pemenang Timur

Nama	Jumlah
Masjid	7 buah
Mushalla	8 buah
Gereja Kristen Protestan	-
Gereja Katholik	-
Wihara	2 buah
Pura	1 buah
Klenteng	-

Sumber Data: Diolah dari “Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan” Pemenang Timur tahun 2012 hal. 44.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

AKHIRNYA penelitian ini tiba di ujung. Pada bagian ini diketengahkan simpulan sebagai temuan atau hasil pembahasan dari fokus kajian. Terkait itu pula diajukan sejumlah saran.

Saran terutama diajukan terkait keterbatasan studi dari penelitian ini, yakni menyangkut sejumlah hal yang terabaikan atau tidak sepenuhnya terkaji tuntas dalam studi ini dan karena itu menjadi bentuk keterbatasannya sebagai sebuah penelitian. Saran dimaksud kiranya dapat dikembangkan lebih lanjut atau dijawab tuntas oleh penelitian-penelitian berikutnya yang bertopik senafas. Selebihnya adalah saran terkait tindak lanjut; dikhususkan teruntuk pihak-pihak yang secara teoretik berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini.

#### **A. Simpulan**

Terkait fokus masalah terdapat tiga simpulan utama dari hasil penelitian ini. *Pertama*, soal bentuk hubungan antarkomunitas agama. Sejauh ini hubungan antarkomunitas agama di desa Pemenang Timur menampilkan suatu bentuk hubungan multikultural yang relatif harmonis, yang kondusif bagi penciptaan ko-eksistensi di tengah masyarakat yang anutan keberagamaannya begitu beragam, yakni Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Bentuk-bentuk ko-eksistensi harmonis antara lain mengejawantah melalui kerja sama keagamaan seperti antarkomunitas beda agama saling membantu dalam membangun tempat-tempat ibadah, saling

antarmasakan di momen-momen keagamaan dan silaturahmi di hari-hari keagamaan, mekanisme penyelesaian dan/atau antisipasi konflik yang diinisiasi bersama antarkomunitas, penguatan mekanisme meritokrasi dalam pemerintahan desa atau pengaturan ruang publik di mana diversitas agama sama sekali tak menjadi preferensi, dan sebagainya.

Kemudian, *kedua*, seputar pandangan keagamaan masing-masing komunitas tentang hubungan antaragama itu. Sebagaimana direpresentasikan para tokohnya masing-masing, pandangan komunitas-komunitas agama di Pemenang Timur secara umum mengapresiasi keragaman, tak terkecuali keragaman agama. Dalam kerangka itu, semua komunitas memandang keragaman sebagai hal niscaya dan karena itu toleransi dan equalitas antarkomunitas agama dinilai penting dalam lanskap penyelenggaraan kehidupan desa. Muara dari seluruh pandangan (informan) adalah keinginan membawa masyarakat Pemenang Timur yang multikultural itu ke dalam “kebersatuan” dan bukan “penyatuan”.

*Ketiga*, menyangkut model tipologis hubungan antarkomunitas agama dan pemaknaan masing-masing komunitas dalam perspektif multikulturalisme. Secara umum fakta hubungan antarkomunitas agama dan pandangan para tokoh lebih-kurang merefleksikan spirit multikulturalisme, yakni kemajemukan agama anutan, kesadaran akan ide “kebersatuan”, kebutuhan akan toleransi aktif, urgensi equalitas, dan adanya *politis of recognition* di mana negara mengambil peran dalam aras politik desa. Jika merujuk lima tipologi ajuan Bikhu Parekh (1997), manifestasi spirit multikulturalisme dalam hubungan antarkomunitas agama di Pemenang Timur cenderung terkategori pada tipologi multikulturalisme isolasionis dan hingga tingkat tertentu juga merefleksikan multikulturalisme tipe

akomodatif. Hal ini tidak terlalu mengagetkan, mengingat Pemenang Timur tetaplah sebuah desa yang masyarakatnya masih terikat takdzim pada nilai-nilai kultural pedesaan di mana tradisi masih menjadi acuan bersama—kendati ia berada di lintasan arus pariwisata di Kabupaten Lombok Utara dan sangat mungkin arus modernitas lebih mudah merasuk masuk.

## **B. Saran**

Bersandar pada keterbatasannya, penelitian ini merasa perlu mengajukan sejumlah saran. Saran *pertama* terutama ditujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang bertopik senada. Mengingat isu hubungan antarkomunitas agama memiliki spektrum isu yang amat luas dan kompleks, persoalannya tentu tidak bisa berputar di masalah bagaimana masing-masing kelompok saling membangun hubungan satu sama lain—seperti dilakukan penelitian ini. Untuk itu, studi-studi berikutnya perlu memperluas fokus, tidak hanya menyoal bentuk hubungan antarkomunitas berbeda agama, tetapi lebih jauh juga—misalnya—bagaimana setiap komunitas agama secara sosial mengkonstruksi komunitas agama lain. Hal ini penting diartikan mengingat betapa banyak kasus konflik dan kekerasan terjadi dengan sebab-sebab yang kompleks; dalam kerangka pembuatan *early warning system*, misalnya, arah penelitian berikutnya perlu pula diperkaya dengan pemilihan kerangka teoretik penelitian.

Demikian juga untuk subjek, perlu diperluas. Tidak hanya membidik mereka yang terkategori tokoh atau pimpinan komunitas lewat wawancara, tapi juga perlu menyoal para warga komunitas lewat kuesioner. Dalam konteks dinamika hubungan antarkomunitas agama, ini dapat menjadi *entry-point* untuk menelaah

konstruk pemikiran keagamaan para elitnya secara lebih komprehensif. Dengan fokus amatan dan analisis yang lebih komprehensif atas seluruh isu terkait diharapkan problem hubungan antarkomunitas agama—sebagaimana antara lain berlangsung di Pemenang Timur—akan akan lebih terurai sehingga dapat menjadi pertimbangan semua pihak, tak hanya elit komunitas agama itu sendiri, untuk lebih berempati pada keberbagaian agama di kini dan mendatang.

Saran *kedua*, terutama ditujukan pada pihak pemerintah. Kementerian Agama RI misalnya, perlu memfasilitasi setiap ikhtiar membangun format ideal kehidupan keagamaan yang berbasis pada bagaimana pandangan komunitas agama tentang isu-isu terkait, khususnya tentang hubungan antarkomunitas. Sebab, banyak “inisiatif perdamaian” tidak maksimal karena bagan kerjanya tidak berangkat dari pengalaman aneka komunitas agama yang berbeda-beda itu sendiri dalam membangun hubungan satu sama lain, melainkan lebih sering dari teori-teori yang sudah *established*. Saran serupa juga untuk mereka, segenap pihak, yang menaruh *concern* di kerja-kerja advokasi HAM, pluralisme, resolusi konflik, dan sejenisnya.

Dalam kaitan itu, sangatlah mendesak bagi pemerintah, termasuk Kementerian Agama RI untuk segera menginisiasi pelembagaan dialog rutin dan produktif antarkomunitas agama. Untuk konteks Pemenang Timur, selain harus rutin terjadwal, tidak insidental hanya setiap kali ada *case*, pelembagaannya harus diarahkan pada penguataan kebersamaan antarkomunitas dalam kesepahaman dan penghormatan dalam keberbedaan. Pelembagaan dialog ini langsung di bawah koordinasi dan fasilitasi Kemenag RI setempat. Pelembagaannya sebaiknya dilakukan di luar pelembagaan dialog yang telah diinstitusionalisasi Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Hal ini mengingat FKUB dalam banyak hal justru telah menjadi bagian dari masalah (*part of problem*) kerukunan antarkomunitas, karena dialog yang dilangsungkan seringkali *bias* komunitas mayoritas di samping seringkali hanya berhenti di tingkat rutinitas belaka atau sekedar langkah reaktif setiap kali ada pertikaian saja.

Saran berikutnya, *ketiga*, ditujukan khusus bagi IAIN Mataram, tepatnya untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Bahwa mengingat masih tingginya probabilitas potensi konflik antarkomunitas agama di Provinsi NTB, di Pulau Lombok khususnya, maka adalah penting bagi IAIN Mataram sebagai institusi pendidikan keagamaan untuk mengadakan semacam proyek percontohan kerukunan antarkomunitas agama, semacam desa binaan sebagai desa model. Pemilihan *locus* proyek difokuskan pada daerah-daerah atau desa-desa yang tensi konflik antarkomunitas agama terhitung tinggi atau sebaliknya pada daerah-daerah atau desa-desa yang justru relatif berhasil mempraktikkan harmoni sosial antarkomunitas seperti di lokasi penelitian ini. Menimbang hasil penelusuran penelitian ini, peneliti merekomendasikan untuk meretas proyek tersebut di lokasi penelitian ini, yakni Desa Pemenang Timur Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

Selebihnya, pemenuhan atas seluruh saran tersebut seyogyanya digerakkan dengan semangat pemberian perlindungan terhadap setiap pemeluk agama, minoritas maupun mayoritas, untuk dapat dengan bebas mengekspresikan keyakinan religiusnya masing-masing seraya menjamin komunitas pemeluk agama lain bebas pula untuk melakukan hal yang sama. Merujuk perspektif multikulturalisme, penguatan spirit tersebut niscaya menuntun setiap komunitas

agama, mayoritas maupun minoritas, pada kearifan dalam memahami dan menyikapi aneka kebenaran yang mengejawatah dalam bentuk agama atau keyakinan yang berpuspa-ragam di tengah masyarakat.[]



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Faishol (et.al.), *Metode dan Teknik Kuliah Kerja Nyata Transformatif: Implementasi Participatory Action Research (PAR) & Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Aksi Perubahan Sosial* (Surakarta: P3M STAIN Surakarta, 2006).
- Abdul Munir Mul Khan, *Kesalehan Multikultural: Ber-Islam Secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005).
- Ahmad Baso, *Plesetan Lokalitas: Politik Pribumisasi Islam* (Depok: Desantara, 2002).
- Alo Liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2003).
- , *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2005).
- Bikhu Parekh, "National Culture and Multiculturalism", dalam Kenneth Thomson (ed.), *Media and Cultural Regulation* (London: Sage Publications, 1997).
- , *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theori* (Hampshire: Macmillan, 2000).
- Burhan Bungin, "Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial," dalam Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003): 100-5.
- Caleb Rosado, "Toward a Definition of Multiculturalism," dalam [http://www.rosado.net/pdf/Def\\_of\\_Multiculturalism.pdf](http://www.rosado.net/pdf/Def_of_Multiculturalism.pdf)
- Charles Taylor, *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (Princeton: Princeton University Press, 1994).
- Chris Barker, *Cultural Studies: Teori & Praktik*, terj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004).
- Clive Erricker, "Pendekatan Fenomenologis," dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri (Jogjakarta: LKIS, 2002): 105-46.
- David Theo Goldberg (ed.), *Multiculturalism: A Critical Reader* (Oxford: Blackwell, 1994).
- Donna Landry dan Gerald Maclean (eds.), *The Spivak Reader: Selected Works of Gayatri Chakravorty Spivak* (New York: Routledge, 1996).
- Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society* (New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002).

- Fadjar I. Thufail, "Riot Narrative: Public Sphere, Pragmatism, and (Multi) Cultural Politics," dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, XXVIII, No. 75 (September-Desember, 2004), dalam <http://www.jai.or.id/jurnal/2004/75/09fit75.htm>
- Fawaizul Umam, "Antara Membina dan Memperbanyak Umat: Pola Penyiaran Agama Hindu dan Islam di Kota Mataram," *Laporan Penelitian* (tidak diterbitkan) (Lemlit IAIN Mataram, 2004).
- Gurpreet Mahajan, *Rethinking Multiculturalism*, <http://www.india.seminar.com/1994>
- Hikmat Budiman (ed.), "Editorial Yayasan Interseksi: Minoritas, Multikulturalisme, Modernitas," dalam *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesi* (Jakarta: The Interseksi Foundation-Yayasan TIFA, 2005): 1-29.
- Israil, dkk., "Dinamika Pluralisme Agama di Nusa Tenggara Barat," dalam *Jurnal Penelitian Keislaman IAIN Mataram Volume 1 Nomor 1* (Desember, 2004): 1-16.
- Jawahir Thontowi, "Multikulturalisme dan Agenda Pembaharuan Sosial," dalam *Jurnal Media Inovasi*, No. 1 Th. XI (2001): 16-7.
- Jim Parry, "Sport, Universals, and Multiculturalism," dalam Adam Muller (ed.), *Concepts of Culture: Art, Politics, and Society* (Alber, Canada: University of Calgary Press, 2005): 265-90.
- John Naisbitt, *Global Paradox*, terj. Budijanto (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994).
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2001).
- M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005).
- Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, terj. Kelompok Studi Agama "Driyarkara" (Jogjakarta: Kanisius, 1995).
- Mustain, "Hubungan Hindu-Muslim di Kota Mataram (Kajian terhadap Potensi Konflik dan Integrasi Hubungan Antaragama)," *Laporan Penelitian* (tidak diterbitkan) (P3M STAIN Mataram, 2003).
- Neil Bissoondath, *Selling Illusions: The Myth of Multiculturalism* (Toronto: Penguin, 2002).
- Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995).
- Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," Makalah pada *Simposium Internasional Bali ke-3 Jurnal Antropologi Indonesia* di Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.
- , "Multikulturalisme sebagai Modal Dasar bagi Aktualisasi Kesejahteraan Rakyat Indonesia," Makalah pada *Sarasehan Nasional: Menghidupkan dan Memantapkan Multikulturalisme sebagai Modal untuk Mewujudkan*

*Kesejahteraan Rakyat di Indonesia* Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan UIN Syahid Jakarta, 8 September 2004.

R.C. Bogdan dan S.K. Bilen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, Inc., 1982).

Ridwan al-Makassary, "Pengarutamaan Multikulturalisme bagi Masyarakat Islam Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Aksi," Makalah pada *Annual Conference on Islamic Studies 2007* di Pekanbaru Riau, 21-24 Nopember 2007: 1-19.

Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

Samuel P. Huntington, "The Clash of Civilization?" dalam *Foreign Affairs* (Summer, 1993): 22-49.

Sanapiah Faisal, "Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif," dalam Burhan Bungin (ed.), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003): 64-79.

Simon Bekker dan Anne Leilde, "Is Multiculturalism a Workable Policy in South Africa," dalam John Rex dan Gurharpal Sing (eds.), *Governance in Multicultural Societies* (London: Ashgate Publishing Limited, 2004).

Sonia Nieto, *Affirming Diversity: The Sociopolitical Context of Multicultural Education* (New York: Longman, 1992).

Suharsimi Arikunto dalam *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Suprpto, "Dakwah Islamiyah dalam Perspektif Pluralisme Agama (Analisis Isi Khutbah Jumat pada Masjid-masjid di Kota Mataram)," dalam *Jurnal Tasâmuḥ* Fakultas Dakwah IAIN Mataram Volume 2 Nomor 1 (Desember, 2004): 61-78.

Vinayak Chaturvedi (ed.), *Mapping Subaltern Studies and the Postcolonial* (London: Verso, 2000).

Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, terj. Edlina Hafmini Eddin (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003).

## BIODATA TIM PENELITIAN

### 1. Ketua Tim

Nama : **Dr. Fawaizul Umam, M. Ag.**  
NIP : 19730227 2000 031 001  
Pangkat/Gol./Ruang: Pembina (IV/a)  
Jab. Fungsional : Lektor Kepala DMK Filsafat Agama  
Tempat/Tgl./lahir : Banyuwangi, 27 Februari 1973  
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Dakwah IAIN Mataram  
Alamat Kantor : FDK IAIN Mataram Jl. Pendidikan 35 Mataram  
Alamat Kos : Gunung Batur Gg Khobir 2 Darul Hikmah DA Mataram  
Kontak : 08154705253, e-mail: fawaizu@yahoo.com

### Karya Penelitian dengan Topik Terkait:

1. *Antara Membina dan Memperbanyak Umat: Pola Penyiaran Agama Hindu dan Islam di Kota Mataram* (Lemlit STAIN Mataram, 2004) — Individu
2. *Merawat Tatanan dengan Modal Sosial: Studi Kasus Komunitas Islam Wetu Telu di Kecamatan Bayan Lombok Barat Nusa Tenggara Barat* (Ditperta Depag RI Jakarta, 2005) — Kolektif/Ketua Peneliti
3. *Kemiskinan dan Kesadaran Religius: Studi atas Model Penghayatan Teologis Masyarakat Miskin di Kota Mataram* (Lemlit IAIN Mataram, 2007) — Individu
4. *Dakwah Berspirit Pluralisme Agama: Studi tentang Potensi dan Strategi Dakwah di Tengah Heterogenitas Agama di Kota Mataram* (Lemlit IAIN Mataram, 2012) — Kolektif/Ketua Peneliti
5. *Memaknai Keragaman: The Others dalam Konstruksi Sosial Para Pimpinan Kelompok-kelompok Keagamaan di Kota Mataram* (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI Jakarta, 2013) – Individu

### 2. Anggota Tim

Nama : **Dr. Abdul Haris, M.Ag.**  
NIP/NIK : 197104231999031001  
NIDN : 2023087203  
Tempat dan Tanggal Lahir: Kudus, 23 April 1971  
Golongan / Pangkat : III/d

Jabatan Fungsional : Lektor  
 Perguruan Tinggi : IAIN Mataram  
 Alamat Kantor : Jl. Pendidikan No. 35 Mataram NTB  
 Alamat Rumah : Perumahan Bumi Selaparang Asri BSA IV Cluster  
 Rinjani RJ 18 Midang, Gunungsari, Lombok Barat-NTB  
 E-mail : abd\_alharis@yahoo.com  
 Telp/HP : 081917946988/085879853131

**HASIL DAN KARYA PENELITIAN**

Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pembiayaan	Jenis Penelitian Pribadi/klompok
2002	“Rekonstruksi Kaedah Kesahihan Matan Hadits”	P3M STAIN Mataram	Kelompok (Ketua)
2005	“Bukak Luwur: Makna Ritual Syuronan dalam Masyarakat Industri”	Lemlit UIN Suka Yogyakarta	Kelompok (Anggota)
2006	“Pola Keberagaman Karyawan Muslim di Kawasan Malioboro Jogjakarta”	Lemlit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Individu
2006	“Mengembangkan Paradigma Ilmu Sains “Profetik”: Studi Analisis tentang Kurikulum dan Skripsi Mahasiswa Tadris MIPA Faklultas Tarbiyah UIN Sunan Kaligaya Yogyakarta”	Lemlit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Kelompok (Anggota)
2011/2012	Hadis-Hadis Ekonomi dalam Fatwa DSN-MUI: Peta Pemahaman Hadis dalam Konteks Ekonomi Syari’ah di Indonesia	Lemlit Fak. Syariah IAIN Mataram	Individu